



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2022

PENYUSUN

TIM PENYUSUN LKJIP PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG

☎ 0751 - 7054806

✉ admin@pta-padang.go.id



@ptapadanggoind



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKJIP** 2022



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id

Kata Pengantar.

"Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Pencari Keadilan Tidak Boleh Dihargai dan Diukur dengan Uang. Ketulusan dan Integritas Harus Diutamakan"
(Pelmizar)

Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalamualaikum Wr Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 selesai disusun dan dapat disajikan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung. Berdasarkan mandat dari undang-undang mengemban tugas untuk melaksanakan Peradilan di Republik Indonesia dan mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang tertera dalam cetak biru Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja dalam memenuhi harapan akan terwujudnya Pengadilan yang transparan, akuntabel dan modern.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja, sedangkan landasan dasar laporan ini adalah Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menguraikan capaian-capaian di Tahun 2022 ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan

pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Khusus kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 PTA Padang, terima kasih atas kerja sama dan kerja keras saudara sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini dapat tersusun dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 24 Februari 2023
Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Padang
Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 195611121981031009



VISI:

**"TERWUJUDNYA
PENGADILAN TINGGI
AGAMA PADANG YANG
AGUNG"**

8 Nilai-Nilai Utama

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

MISI:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Padang ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu 1 tahun, yang dianalisa dengan

rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022, dengan ditetapkan dua program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi Utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta Program Dukungan Manajemen yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98%	98%
	2	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	67%	74%	110%
	3	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	98%	98%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			102%		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			100%		
Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)	1	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%	100%	100%
	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	85	96.56	114%
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	93	99.17	107%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari MA RI)			107%		

Untuk mewujudkan 3 sasaran tersebut maka pada pagu dan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 berdasarkan program disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	13.648.281.000	13.641.242.851	99.94
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA RI	316.000.000	315.985.150	99.99
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	388.802.000	388.395.102	99.90

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
Struktur Organisasi.....	4
Sistematika Penyajian.....	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	7
RENCANA STRATEGIS.....	8
Visi dan Misi.....	8
Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
Program dan Kegiatan Strategis.....	9
RENCANA KERJA TAHUN 2022.....	10
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	11
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
• Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	13
• Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
• Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	31
• Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	36
• Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	41
• Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
• Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja.....	49
REALISASI ANGGARAN.....	52
BAB IV	
PENUTUP.....	62
Kesimpulan.....	63
Rekomendasi.....	64
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022	
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang	
3. Pernyataan Telah Di Reviu dan Checklist Reviu	
4. SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	
5. Matriks Reviu Rencana Strategis	
6. Rencana Kinerja Tahunan 2022	
7. Perjanjian Kinerja 2022	
8. Pengukuran Kinerja per Triwulan Tahun 2022	
9. Eviden Rapat Penyusunan LKjIP	
10. Piagam/Sertifikat Penghargaan	

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Capaian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	iii
TABEL 2	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	iv
TABEL 3	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	9
TABEL 4	Revisi Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	10
TABEL 5	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	11
TABEL 6	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	13
TABEL 7	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	15
TABEL 8	Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	16
TABEL 9	Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.....	16
TABEL 10	Nilai Rata Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	17
TABEL 11	Nilai Mutu Pelayanan.....	17
TABEL 12	Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.....	17
TABEL 13	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	18
TABEL 14	Indikator terlaksananya pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Tahun 2022.....	20
TABEL 15	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2019 s.d 2022.....	22
TABEL 16	Sasaran Menigkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan Tahun 2022.....	22
TABEL 17	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2022.....	24
TABEL 18	Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2022.....	25
TABEL 19	Penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2019 s.d 2022.....	25
TABEL 20	Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2022.....	26
TABEL 21	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 s.d 2022.....	27
TABEL 22	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2022.....	28
TABEL 23	Keadaan Perkara dan Salinan Putusan yang dikirim Tahun 2019 s.d 2022.....	28
TABEL 24	Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Tahun 2019 s.d 2022.....	29
TABEL 25	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2019 s.d 2022.....	30
TABEL 26	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2019 s.d 2022.....	30
TABEL 27	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	31
TABEL 28	Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	32
TABEL 29	Perbandingan Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	32
TABEL 30	Perbandingan Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	33
TABEL 31	Perbandingan Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	33
TABEL 32	Perbandingan Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	34
TABEL 33	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	34
TABEL 34	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	35

DAFTAR TABEL

TABEL 35	Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	36
TABEL 36	Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain.....	36
TABEL 37	Perbandingan Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	37
TABEL 38	Perbandingan Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain.....	37
TABEL 39	Perbandingan Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	38
TABEL 40	Perbandingan Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain.....	38
TABEL 41	Perbandingan Presentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	38
TABEL 42	Perbandingan Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain.....	39
TABEL 43	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2022 dengan Tingkat Banding Lainnya.....	39
TABEL 44	Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lainnya.....	40
TABEL 45	Perkara diputus dan masuk serta jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti tahun 2018 s.d 2022.....	45
TABEL 46	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2020 s.d 2022.....	46
TABEL 47	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2020 s.d 2022.....	47
TABEL 48	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	52
TABEL 49	Realisasi DIPA 01 Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	53
TABEL 50	Realisasi DIPA 04 Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	54
TABEL 51	Realisasi Anggaran Per Program Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2022.....	54
TABEL 52	Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA RI.....	56
TABEL 53	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01) Tahun Anggaran 2022.....	57
TABEL 54	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2022.....	58
TABEL 55	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.04) Tahun Anggaran 2022.....	58
TABEL 56	Biaya Proses Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	59
TABEL 57	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.04) Tahun Anggaran 2022.....	59

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	3
GAMBAR 2	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	4
GAMBAR 3	Penjelasan Visi Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	8
GAMBAR 4	Program Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	11
GAMBAR 5	Tanggal Pengiriman Putusan dan Tanggal Minutasi di SIPP.....	19
GAMBAR 6	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.....	21
GAMBAR 7	Pengawasan dan Pembinaan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	21
GAMBAR 8	Penerimaan Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.....	23
GAMBAR 9	Aplikasi PASTI Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	29
GAMBAR 10	Monev dalam Aplikasi PASTI Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	29
GAMBAR 11	Sosialisasi PNPB Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	43
GAMBAR 12	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	44

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	Penyelesaian Perkara Tahun 2022	15
GRAFIK 2	Penyelesaian Perkara Tahun 2019 sd 2022.....	25
GRAFIK 3	Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2022.....	26
GRAFIK 4	Persentase Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2019 s.d 2022.....	27
GRAFIK 5	Persentase Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2022.....	28
GRAFIK 6	Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	52
GRAFIK 7	Penyerapan Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	53
GRAFIK 8	Penyerapan Anggaran DIPA 04 Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	54
GRAFIK 9	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	56
GRAFIK 10	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01) Tahun Anggaran 2022.....	57
GRAFIK 11	Realisasi (Penyerapan) Anggaran DIPA 01 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.....	59
GRAFIK 12	Realisasi (Penyerapan) Anggaran DIPA 04 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022.....	60



BAB 1

Pendahuluan

**LATAR
BELAKANG**

**KEDUDUKAN
TUGAS DAN
FUNGSI**

**STRUKTUR
ORGANISASI**

**SISTEMATIKA
PENYAJIAN**

LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa : "peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu".

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI yang membawahi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Sumatera Barat yang meliputi:

1. Pengadilan Agama Pariaman
2. Pengadilan Agama Solok
3. Pengadilan Agama Sawahlunto
4. Pengadilan Agama Pulau Punjung
5. Pengadilan Agama Batusangkar
6. Pengadilan Agama Padang
7. Pengadilan Agama Padang Panjang
8. Pengadilan Agama Sijunjung
9. Pengadilan Agama Koto Baru
10. Pengadilan Agama Muara Labuh
11. Pengadilan Agama Painan
12. Pengadilan Agama Bukittinggi
13. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
14. Pengadilan Agama Talu
15. Pengadilan Agama Maninjau
16. Pengadilan Agama Payakumbuh
17. Pengadilan Agama Tanjung Pati
18. Pengadilan Agama Lubuk Basung

Dalam BAB VIII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada bagian pendahulumannya diuraikan sebagai berikut:

"Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional."

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan laporan kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan: "standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur".

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Padang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain: Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reansuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

Fungsi Mengadili (judicial power) yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya." (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)



Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. "sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya." (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)



Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya



Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009).



Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



Fungsi Lainnya yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).



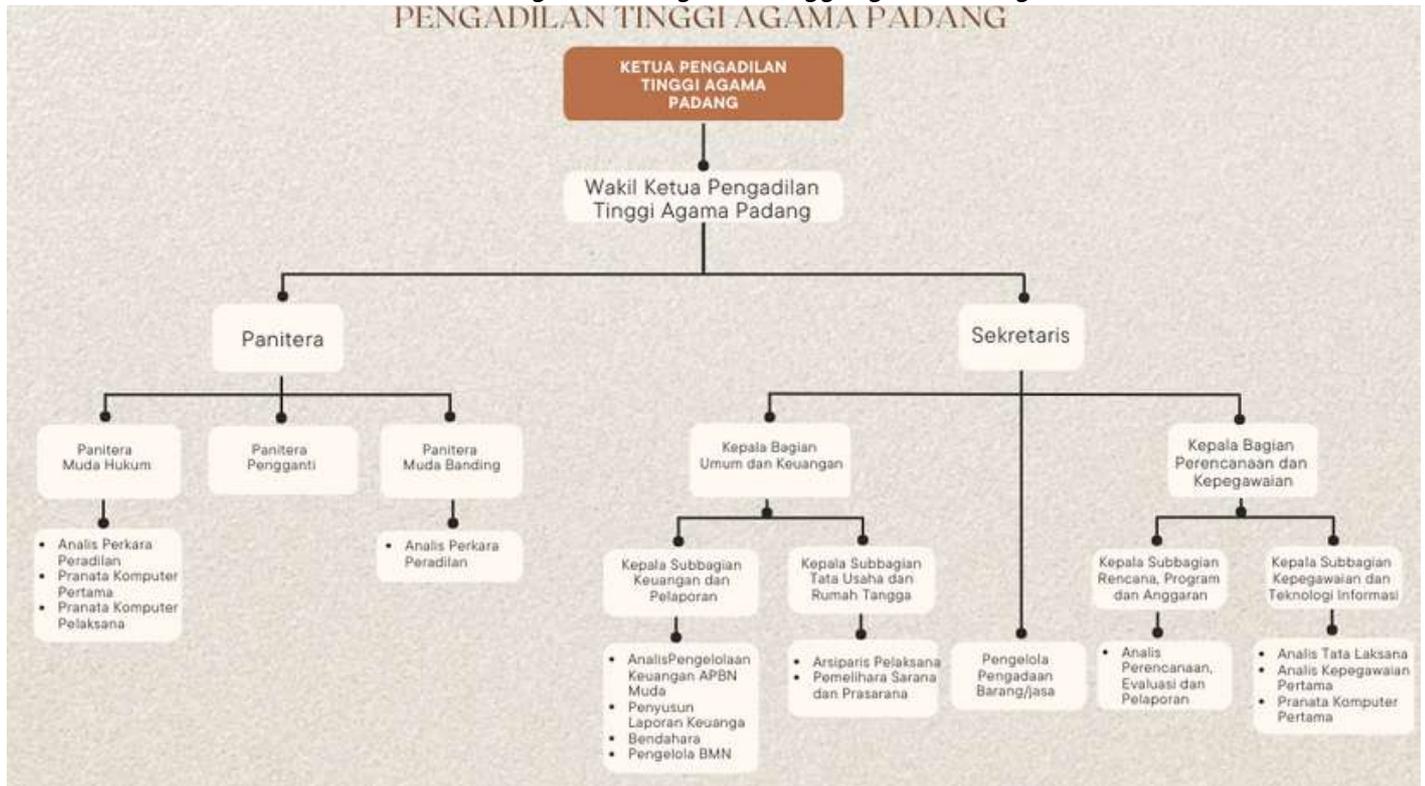
WILAYAH YURISDIKSI

Gambar 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang



STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang



Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 105. Ayat 2, disebutkan bahwa : "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015. Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris (supporting unit) sebagai pendukung tugas perkara.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan,

Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta 4 (empat) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian dan Teknolgi Infromasi, Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Keuangan dan Pelaporan serta Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Padang dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dengan menitik beratkan pada beberapa aspek isu strategis sebagai berikut:

ISU STRATEGIS

- 1 **Produktifitas Penyelesaian Perkara.** Dalam rangka meningkatkan produktifitas penyelesaian Perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Banding pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

2 Akseptabilitas Putusan Hakim

Penataan dan pembinaan penanganan perkara dilakukan dengan pengaktifan fungsi pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga sedapat mungkin perkara selesai di tingkat *judex facti*, dengan penjatuhan putusan dan penetapan yang dapat menyeimbangkan antara pemenuhan rasa keadilan, jaminan kepastian hukum, dan pemberian kemanfaatan. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Padang ini turut digambarkan dari penurunan upaya hukum para masyarakat pencari keadilan yang melakukan kasasi. Percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan ini, sesuai dengan amanat cetak biru terkait sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi.

3 Pengiriman Salinan Putusan dan Publikasi Putusan.

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju serta Publikasi Putusan selalu konsisten 100%. Hal ini menggambarkan telah terlaksananya efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, cepat transparan dan akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan. Setelah putusan dibacakan oleh majelis Hakim Panitera Pengganti yang membantu hakim dalam persidangan langsung melakukan minutasikan berkas perkara sesuai kronologis jalannya perkara dan langsung mempublikasikan seluruh informasi melalui Aplikasi SIPP dan publikasi putusan melalui Direktori putusan Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama.

4 Akreditasi Penjamin Mutu

Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu, sebagaimana program Ditjen Badan Peradilan Agama bertujuan untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Exellent). Tahun 2022 telah dilakukan asesmen Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat

untuk melihat sejauh mana kesinambungan pelaksanaan APM di satker tersebut dimana pada penilaian Tahun 2021 seluruh satker PA se Wilayah PTA Padang telah terakreditasi dengan nilai Akreditasi Predikat A*** (11 satker), Predikat A** (6 satker) dan Predikat A* (1 satker). Pengadilan Tinggi Agama Padang Sendiri Tahun 2021 berhasil memperoleh Akreditasi Predikat A***. Namun untuk tahun 2022 dengan keluarnya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4095/DJA.3/HM.00/9/2022 tanggal 10 Oktober 2022, tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM, maka kegiatan Asesmen APM Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi serta hal lainnya dinyatakan tidak diperlukan lagi. Selanjutnya data eviden APM dimanfaatkan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan implementasi administrasi peradilan ataupun sebagai bahan evaluasi pembangunan zona integritas.

5 Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2019 yang turut disaksikan oleh Gubernur serta Pejabat Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Integritas. Dalam upaya mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan ZI, PTA Padang telah melakukan Desk Evaluasi pada Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dan telah dilakukan pengusulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satker penerima WBK, namun dalam 2 kali pengusulan PTA Padang belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK dan akhirnya pada usulan yang ke 3 tahun 2021 PTA Padang berhasil meraih Predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tepatnya pada tanggal 20 Desember 2021, bersama 48 Satuan Kerja Lainnya di bawah Mahkamah Agung yang memperoleh Predikat WBK/WBBM. Keberhasilan tersebut merefleksikan bukti nyata kesungguhan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2022. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

Perencanaan Kinerja

**RENCANA
STRATEGIS
2020-2024**

**RENCANA
KERJA
TAHUNAN
2022**

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUNAN
2022**

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai 2024. Renstra 2020-2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam "Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035". Renstra yang merupakan penjabaran visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Selain visi, Renstra juga memuat misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

VISI DAN MISI

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Visi menunjukkan arah tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan visi.

Gambar 3. Penjelasan Visi Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang maka dirumuskan ke dalam bentuk yang terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan perumusan tujuan strategis juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang agar tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan dapat terwujud adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sementara untuk Tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang, sasaran strategisnya adalah Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI).

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan Reviu terhadap IKU berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1317.a/OT.01.IV/2022 tentang Penetapan Reviu IKU PTA Padang Tahun 2022. IKU yang ditetapkan tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut IKU Pengadilan Tinggi Agama Padang:

Tabel 3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Padang

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	Index persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

Dengan adanya tujuan dan sasaran strategis menjadi arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Terdapat **2 Program** yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang yakni sebagai berikut:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum** merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Dengan sasaran program Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program

ini adalah peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan rincian output sebagai berikut:

- Pembinaan Pemeriksaan Yustisial, dengan komponen Pembinaan dan Pemeriksaan teknis dan administrasi pengadilan. Anggarannya bersumber dari PNBP.
- Pembinaan dan Pemantauan Layanan Peradilan dengan komponen Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan. Kegiatannya berupa Pengawasan Pelayanan Publik serta Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan.
- Bimtek/Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP dengan komponen Sosialisasi PNBP teknis. Anggaran ini bersumber dari PNBP;
- Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara secara Elektronik berupa bimbingan teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama;

2 Program Dukungan Manajemen dibuat dengan sasaran program Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima Pengadilan. Adapun Kegiatannya adalah:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kinerja kinerja berupa:

- Meningkatnya pengelolaan pelayanan system informasi terintegrasi;
- Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif;
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan efektif dan efisien;
- Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan;
- Meningkatnya pengelolaan keamanan urusan tata usaha rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung;
- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan indikator kinerja kegiatan berupa Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Sedangkan Output kegiatan adalah Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan indikator jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan revisi pada Rencana Kinerja Tahun 2022 seiring dengan dilakukannya Revisi pada IKU Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung, yang berimbas pada dokumen perencanaan dibawahnya. Selain itu berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja, target yang ditetapkan pada 2 Indikator Kinerja Utama terlalu tinggi sehingga diakhir tahun dikhawatirkan tidak dapat tercapai. Indikator tersebut adalah "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" dan Indikator "Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan". Oleh karena itu dilakukan revisi target pada 2 Indikator tersebut.

Tabel 4. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	67%
		Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	98%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%



Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2022, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang mendapatkan Pagu anggaran sebesar 14.748.055.000. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

Gambar 4. Program Pengadilan Tinggi Agama Padang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai Indikator Kinerja Utama yang bersifat outcome. Adanya Revisi IKU Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai bentuk tindak lanjut dari SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga berefek pada Perjanjian Kinerja sebagai Dokumen turunannya sehingga harus dilakukan revisi. Berikut Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

Tabel 5. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	67%
		Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	98%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

**CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI**

**REALISASI
ANGGARAN**

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	98%	98%
		2	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	67%	74%	110%
		3	Index persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	98%	98%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				102%		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				100%		
3	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)	1	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%	100%	100%
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	85	96,56	114%
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	93	99,17	107%
Rata-rata capaian Sasaran Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)				107%		

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga dapat diketahui apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2022, diperoleh data bahwa rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel sebesar 102%, dan rata-rata capaian sasaran terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 100%. Dengan demikian rata-rata capaian kedua sasaran yang memuat tentang kinerja *corebusiness* Pengadilan tersebut adalah sebesar 101%. Sementara itu hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI) pada Tahun 2022 mencapai 107%.. Berikut dijelaskan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 pada masing masing sasaran dan indikator .



SASARAN 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG➔ PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang dimulai sejak perkara didaftar sampai dengan diputus dapat berjalan secara efektifitas dan efisien, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Dari 3 indikator yang diukur pada sasaran ini, 1 indikator memperoleh capaian < 100%, dan 2 indikator capaiannya $\leq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------|
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | : 98% |
| 2. Pesentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | : 110% |
| 3. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan | : 100% |



Sasaran 1: Indikator 1 Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang mengatur Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Pada awal tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak memiliki sisa perkara tahun 2021. Perkara yang diterima atau terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2022 sebanyak **66 perkara**, sehingga beban perkara pada tahun 2022 adalah sebanyak 66 perkara. Semua beban perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2022 atau telah diputus sebanyak 66 perkara. Dan dari semua Perkara yang diputus tahun 2022 tersebut 65 perkara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai aturan SEMA No. 4 Tahun 2014 sedangkan 1 Perkara putus lewat waktu.

Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat diukur dengan membandingkan perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya jika ada. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

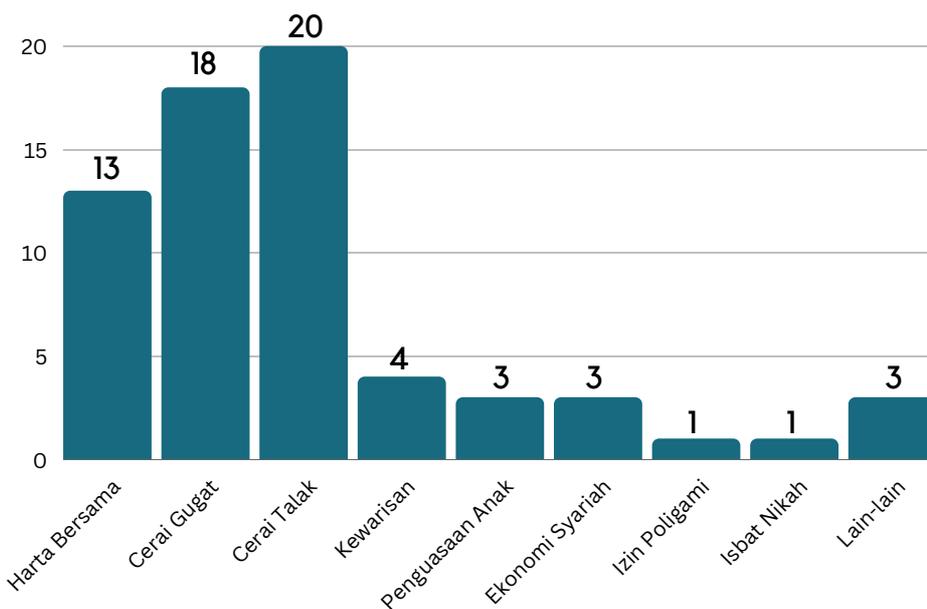
$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut: Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 adalah = $65/66 \times 100\% = 98\%$. Capaian kinerja tahun 2022 = $(98\%)/(100\%) \times 100\% = 98\%$. Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 98%. Tidak tercapainya target tahun 2022 pada indikator ini disebabkan oleh adanya 1 (satu) perkara dengan perintah pemeriksaan tambahan di Pengadilan Pengaju oleh Hakim melalui putusan sela. Di Pengadilan pengaju ternyata pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu selama 91 hari kalender, sehingga perhitungan perkara tersebut semenjak mulai terdaftar sampai putus memakan waktu selama 110 hari kalender atau melewati waktu 3 bulan. Kondisi ini membuat capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu tidak sesuai target, capaiannya adalah 98%, tanpa ada sisa perkara pada akhir tahun. Walaupun tidak dapat memenuhi target, namun kinerja dari Indikator Ini dapat dikatakan baik karena 98% perkara di pengadilan Tinggi Agama Padang dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau lebih cepat dari aturan maksimal 3 (tiga) bulan.

Tabel 7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	66	65	100%	98%	98%

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2022



Pada grafik dapat dilihat bahwa jenis perkara yang masuk selama tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Agama Padang terbanyak ada pada kasus cerai talak yakni 20 perkara, kemudian cerai gugat sebanyak 18 perkara, harta bersama 13 perkara, dan perkara lainnya kurang dari 5 perkara, dengan total penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 sebanyak 66 perkara.



Sasaran 1: Indikator 2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan tingkat banding. Jika semakin sedikit para pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum kasasi maka dapat diartikan para pihak tersebut semakin puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding. Untuk menghitung persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 8. Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Realisasi %	Target 2022	Capaian 2022
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	66	49	74%	67%	110%

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 67%. Dari 66 perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2022, sebanyak 17 perkara mengajukan upaya hukum kasasi, atau perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 49 perkara. Sehingga realisasi kinerja indikator ini, perkara yang tidak kasasi persentasenya adalah $49/66 \times 100\% = 74\%$. Dan persentase perkara yang mengajukan kasasi menjadi $17/66 \times 100\% = 26\%$. Untuk kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi persentasenya yaitu sebesar 74%, sehingga capaian kinerja pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah $(74\%/67\%) \times 100\% =$ sebesar 110%. Keadaan perkara tingkat banding dan diajukan kasasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Dari tabel terlihat bahwa keberhasilan pada indikator ini pada Tahun 2022 cukup tinggi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa putusan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagian besar dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara.

Sasaran 1: Indikator 3 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan diketahui melalui survey kepuasan stakeholder yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan semua pemangku kepentingan yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan tingkat banding. Semakin tinggi index persepsi stakeholder, semakin bagus pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah index persepsi stakeholder, berarti semakin rendah atau buruk pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Untuk memperoleh index persepsi stakeholder, pertama dicari nilai survey dengan menggunakan istilah "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Nilai tersebut dihitung dengan membagi jumlah bobot dengan unsur. Selanjutnya, untuk memperoleh index responden unit pelayanan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 9 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	98%	98%	100%

Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi agama padang tahun 2022 adalah sebesar 98 dengan target yang ditetapkan sebesar 98, sehingga capaian kinerjanya di tahun 2022 adalah 100%. Pengukuran index persepsi stakeholder ini berada pada kategori sangat baik (pada interval 88,31-100).

Realisasi kinerja indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi pelayanan publik dengan survey yang telah dilakukan pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2022 oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara e-survey. Survey dilakukan terhadap stakeholder yang menerima layanan PTA Padang. Survei kepuasan masyarakat memiliki 9 (sembilan) unsur pelayanan. Nilai dari masing masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel disamping. Untuk menghitung hasil survei sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur.

Tabel 10. Nilai Rata Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,91	Sangat Baik
2	Kemudahan pemenuhan prosedur	3,93	Sangat Baik
3	Waktu penyelesaian pelayanan	3,93	Sangat Baik
4	Kesesuaian biaya pelayanan	3,95	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,95	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,93	Sangat Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan	3,95	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan	3,94	Sangat Baik
9	Sarana dan prasarana	3,93	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,94	Sangat Baik

Tabel 11. Nilai Mutu Pelayanan

No	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel, Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan untuk tahun 2022 di peroleh sebesar 98 dan masuk pada kategori A (Sangat Baik) sedangkan target Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah 98% dimana tidak terdapat kurang capaian dari target yang ditetapkan. Maka capaian kinerja adalah sebesar:

Capaian kinerja tahun 2022:

$$\frac{98}{98} \times 100\% = 100\%$$

98

Tabel 12. Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Ket	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-rata	3.91	3.93	3.93	3.95	3.95	3.93	3.95	3.94	3.93
NRR Tertimbang	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Jumlah Nilai Tertimbang	3.935								
Nilai Penimbang	25								
Survei Kepuasan Masyarakat	98.4	A	Sangat Baik						





SASARAN 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN➔ PENYELESAIAN PERKARA

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran strategis pertama, dimana untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, perlu diiringi oleh peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang menyusun strategi kedua yang dituangkan dalam bentuk 1 (satu) indikator kinerja tahun 2022 yakni "Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu" dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 13. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Target pada tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu adalah 100%. Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 sebanyak 66 perkara, sudah diselesaikan atau dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sejumlah 66 salinan putusan dengan mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Indikator Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam mengirimkan salinan putusan oleh majelis hakim tingkat banding kepada pengadilan agama pengaju secara cepat, tepat waktu agar para pihak pencari keadilan dapat segera mengetahui keputusan dari perkaranya.

Dari rumus indikator kinerja, capaian persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut:

- Realisasi salinan putusan yang dikirim ke pengaju tepat waktu tahun 2022 = $x \ 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja tahun 2022 = $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

Pada umumnya pengadilan Tinggi Agama Padang langsung mengirim salinan putusan pada hari perkara tersebut putus, namun jika perkara tersebut di putus Majelis Hakim pada sidang yang dilaksanakan di sore hari, maka pengirimannya dilakukan keesokan harinya. Jadi, putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dikirim ke Pengadilan pengaju paling lama 2 (dua) hari, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selalu tepat waktu. Hal ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam pengiriman putusan perkara.



Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam penyampaian Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi dan melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat Banding mahkamah Agung, seperti pada screnshoot SIPP di bawah ini yang menggambarkan Tanggal Minutasi dan tanggal pengiriman berkas oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang

Gambar 5. Tanggal Pengiriman Putusan dan Tanggal Minutasi di SIPP

The screenshot displays a web browser window with the URL sipp-banding.mahkamahagung.go.id/perkara_detil_banding/ZF-drTmlUwzHzcNWbbGt3eVvY0VhNkaqMzZbkK0Lh1MkuQ2Vkd0NMGjNXVET1hdHmTWdTVE1HQWQDUhAbTRoRjkiUFRHU1A9yWDB0VU1OUnc3PQ==/UkZLRDlyS0MSj0QzBr.... The main content area shows a legal document with the following sections:

- MENGADILI**
 - 1. Menerima permohonan banding pembanding;
 - 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rawasan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Pm, Tanggal 27 Desember, 2021. Aliradnya bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
- Dengan mengadili sendiri
- Dalam Konvensi**
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
 - 2. Menetapkan sebuah mobil merek Isuzu type TRR 54f turbo LM, jenis mobil penumpang, model mini bus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2.499 CC, warna hitam, nomor rangka MHCTBR54FFX326249, nomor mesin E32649, bahan bakar solar dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor 00592042 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat/ Direktorat Lalu Lintas tanggal 26 Desember 2019 atas nama Maswardi, Nomor Polisi BA 1315 WB adalah harta bersama Penggugat (Sf Fatmum Juha binti Lukman Pi ter Tanjung) dan Tergugat (Haswardi Bin Ali Munir);
 - 3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum 2 (dua) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut;
 - 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 2 (dua) dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) di atas. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
- Dalam Rekonsi**
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan hutang yang dibuat pada tahun 2018 atas nama Tergugat Rekonsi (Haswardi bin Ali Munir) di Bank Bukopin Padang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang sampai bulan November 2021, utang tersebut beresisa sejumlah Rp177.133.364,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ratus enam puluh empat rupiah) sebagai utang bersama Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi;
 - 3. Menghukum Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi untuk membayar masing-masing ½ (seperdua) utang tersebut pada poin 2 kepada Bank Bukopin, apabila ada yang wanprestasi maka beban hutang tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang wanprestasi;
 - 4. Menyatakan uang tabungan di Bank Bukopin atas nama Penggugat Rekonsi (Haswardi bin Ali Munir) yang diambil oleh Tergugat Rekonsi pada bulan April 2021 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi;
 - 5. Menghukum Tergugat Rekonsi untuk menyerahkan ½ (seperdua) uang pada poin 4 tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsi;
 - 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsi terhadap 1 (satu) buah Pin Emas Korp- RQ milik Penggugat Rekonsi yang didapatkan pada tahun 2020 dengan taksiran harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsi untuk selebihnya tidak dapat diterima. (Nir Cawardikelyk Wk/kaat);
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
 - 1. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi dan Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2. Membebankan kepada Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

The sidebar on the left contains the following items:

- Amar Putusan
- E-Doc Putusan
- E-Doc Putusan Anonimisasi
- Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
- Cetak Dokumen Putusan
- Tanggal Pembentahan Putusan
- Tanggal Pengiriman Salinan Putusan
- Tanggal Minutasi
- Tanggal Pengiriman Berkas
- Keterangan

At the bottom of the document content, there are two red arrows pointing to the following fields:

- Tanggal Pengiriman Salinan Putusan**: Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Minutasi**: Selasa, 08 Mar. 2022

SASARAN 3

TERWUJUDNYA DUKUNGAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN TINGKAT BANDING (PENUGASAN DARI MAHKAMAH AGUNG RI)

Sasaran ini merupakan wujud dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Pengadilan tingkat banding atas fungsi pembinaan dan pengawasan. Selain itu dalam sasaran ini terdapat indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja kesekretariatan selaku *supporting unit* Pengadilan. Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat diukur kinerjanya tidak saja terhadap kinerja yang berhubungan dengan *core business* namun juga terhadap kinerja tambahan Pengadilan. terdapat 3 Indikator pada sasaran ini yaitu terkait tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan, Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen. Dari 3 indikator yang diukur pada sasaran ini, 1 indikator memperoleh capaian < 100%, dan 2 indikator capaiannya \leq 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan (100%)
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (114%)
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen (107%)



Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Padang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan Fungsi Pembinaan sesuai dengan regulasi tersebut yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama se-Sumatera Barat menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. Pengawasan ini merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyelenggarakan dalam hal pengawasan baik internal maupun pengawasan terhadap Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dapat dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang secara continue berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Salah satu inovasi yang dilakukan PTA Padang adalah dengan menggunakan **Aplikasi Pengawasan Terintegrasi (Aplikasi PASTI)**. Aplikasi ini mulai efektif digunakan pada tahun 2022.

Tabel 14. Indikator terlaksananya pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengadilan.	100%	100%	100%

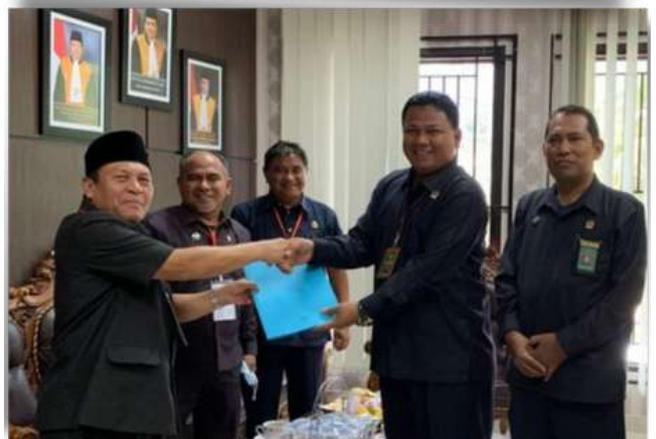
Dari tabel dapat dilihat bahwa Capaian kinerja pada Indikator ini adalah 100%. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan pada 18 satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan 489 temuan. Melalui kegiatan monev tindak lanjut LHP Pengawasan, didapatkan data dari 489 temuan tersebut, seluruhnya telah dapat ditindaklanjuti. Selain itu PTA Padang juga melakukan pembinaan terkait pemenuhan APM dan Pembangunan Zona Integritas terkait reformasi birokrasi.



Gambar 6. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022

No	Nama Satker	Manajemen Peradilan	Administrasi Perkara	Administrasi Persidangan	Administrasi Umum	Kinerja Pelayanan	Jumlah	
							Temuan	Tindak Lanjut
1	Pengadilan Agama Talu	1	4	4	14	3	26	26
2	Pengadilan Agama Bukittinggi	1	4	13	6	6	30	30
3	Pengadilan Agama Sijunjung	2	4	5	6	4	21	21
4	Pengadilan Agama Solok	2	8	3	7	1	21	21
5	Pengadilan Agama Batuankar	2	8	3	9	6	28	28
6	Pengadilan Agama Padang Panjang	2	3	5	11	2	23	23
7	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	2	0	3	11	2	18	18
8	Pengadilan Agama Tanjung Pahi	2	6	12	12	7	39	39
9	Pengadilan Agama Muara Labuh	2	5	3	10	1	21	21
10	Pengadilan Agama Payakumbuh	3	4	14	17	2	40	40
11	Pengadilan Agama Padang	1	8	7	4	1	21	21
12	Pengadilan Agama Painan	0	2	15	12	7	36	36
13	Pengadilan Agama Sawahlunto	2	6	4	10	1	23	23
14	Pengadilan Agama Pulau Punjung	6	5	6	11	3	31	31
15	Pengadilan Agama Pariaman	3	4	5	13	4	29	29
16	Pengadilan Agama Maninjau	0	6	15	6	3	30	30
17	Pengadilan Agama Koto Baru	1	3	15	10	7	36	36
18	Pengadilan Agama Lubuk Basung	1	1	4	8	2	16	16
Total							489	489

Gambar 7. Pengawasan dan Pembinaan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Strategis nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Padang dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dilakukan saat rapat berjenjang pada bagian kesekretariatan. Indikator ini diukur berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) dari aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Tabel 15. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	85	96.56	114%

Nilai akhir IKPA DIPA 04 pada tahun 2022 bulan Desember adalah sebesar 96.56 Penilaian ini mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran, yang terdiri dari nilai Revisi DIPA (100) bobot 10 dengan nilai akhir 10 dan nilai Deviasi Halaman III DIPA (83.50) bobot 10 dengan nilai akhir 8.35. Total kedua indikator ini sebesar 91.75;
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari nilai Penyerapan Anggaran (96.20) bobot 20, dengan nilai akhir 19.24. Dispensasi SPM (100) bobot 5, dengan nilai akhir 5. Kategori penilaian ini memperoleh Nilai Aspek sebesar 98.10.
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (100) bobot 25, nilai akhir 25, dengan Nilai Aspek sebesar 100.

Dari 3 elemen berikut diperoleh Nilai Total sebesar 67.59, dengan konversi bobot 70%, dan diperoleh Nilai Akhir sebesar 96.56. Capaian Kinerja pada Indikator ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan dukungan teknis penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang menjadi sasaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ini.

Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Padang dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin dilakukan saat rapat berjenjang pada bagian kesekretariatan. Indikator ini diukur berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) dari aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Tabel 16. Sasaran Menigkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	93	99.17	107%

Nilai akhir IKPA DIPA 01 pada tahun 2022 bulan Desember adalah sebesar 99.17. Penilaian ini mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran, yang terdiri dari nilai Revisi DIPA (100) bobot 10 dengan nilai akhir 10 dan nilai Deviasi Halaman III DIPA (100) bobot 10 dengan nilai akhir 10. Dari kedua kategori ini berhasil memperoleh Nilai Aspek sebesar 100;
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari nilai Penyerapan Anggaran (99.57) bobot 20, dengan nilai akhir 19.91. Belanja Kontraktual (100) bobot 10, dengan nilai akhir 10. Penyelesaian Tagihan (100) bobot 10, dengan nilai akhir 10. Pengelolaan UP dan TUP (92.57) bobot 10, dengan nilai akhir 9.26. Kemudian Dispensasi SPM (100) bobot 5, dengan nilai akhir 5. Dari 5 kategori penilaian ini memperoleh Nilai Aspek sebesar 98.43.
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (100) bobot 25, nilai akhir 25, dengan Nilai Aspek sebesar 100.

Pencapaian nilai akhir DIPA 01 pada bulan Desember (semester II) Tahun 2022 mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Terbaik Kedua Satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran kategori Satker Non Kementerian Keuangan (Konversi 100%) Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan nilai 99,17.

Capaian ini sekaligus memperbaiki peringkat PTA Padang yang sebelumnya, berhasil mendapatkan penghargaan dari KPPN Padang sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Keempat Kategori Konversi Bobot 100% Periode Semester I Tahun 2022 dengan Nilai 98.49. Keberhasilan PTA Padang dalam pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran juga diikuti oleh satuan kerja yang berada di bawahnya yakni PA Padang dan PA Painan masing masing sebagai Peringkat I Satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran kategori Satker Non Kementerian Keuangan (Konversi 100%) Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Wilayah masing masing. Hal ini mengindikasikan pembinaan yang dilakukan PTA Padang dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Gambar 8. Penerimaan Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan



PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 17. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2020	2021	2022		
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	102%	102%	100%	100%	98%	98%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86%	106%	92%	67%	74%	110%
		Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	92%	100%	103%	98%	98%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	98.99	72.24	83.66	85	96.56	114%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	96.93	92.15	88.05	93	99.17	107%

Sasaran 1: Indikator 1 Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 18. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2022

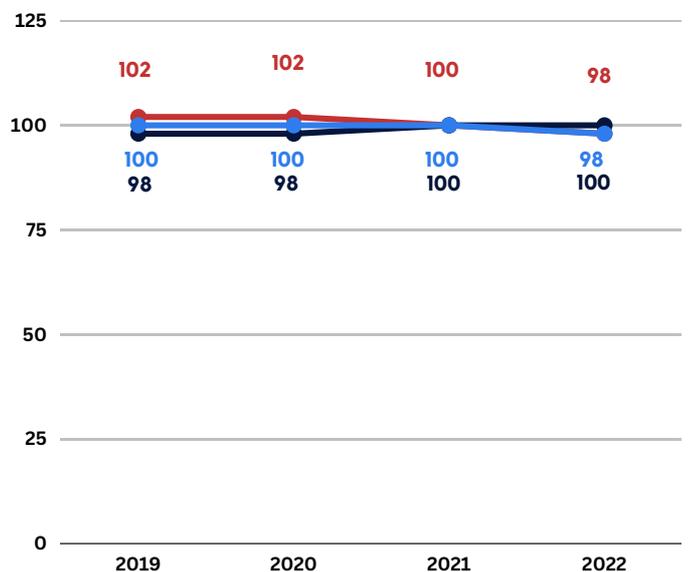
No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2019	2020	2021	2022		
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	102%	100%	100%	98%	98%

Pada 3 tahun terakhir ini kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait dengan capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu dari segi persentase dapat dicapai 100 persen atau lebih yaitu pada tahun 2019 capaiannya sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 102% tahun 2021 sebesar 100%. sedangkan untuk tahun 2022 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 98 %, atau terjadi penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh karena adanya satu perkara dengan perintah pemeriksaan tambahan di Pengadilan Pengaju dengan putusan sela. Di Pengadilan pengaju pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu selama 91 hari kalender, sehingga perhitungan perkaranya semenjak mulai terdaftar sampai putus memakan waktu selama 110 hari kalender. Kondisi ini menjadikan penurunan capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu sehingga perkara yang diterima telah dapat diselesaikan tepat waktu hanya 98%, tanpa ada sisa perkara pada akhir tahun.

Tabel 19. Penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2019 s.d 2022

No	Tahun	Perkara Putus	Perkara Putus tepat waktu	Sisa Tahun Lalu	% Perkara yang Diselesaikan	Sisa Akhir Tahun
1	2019	64	64	5	100%	0
2	2020	61	61	0	100%	0
3	2021	55	55	0	100%	0
4	2022	66	65	0	98%	0

Grafik 2. Penyelesaian Perkara Tahun 2019 sd 2022



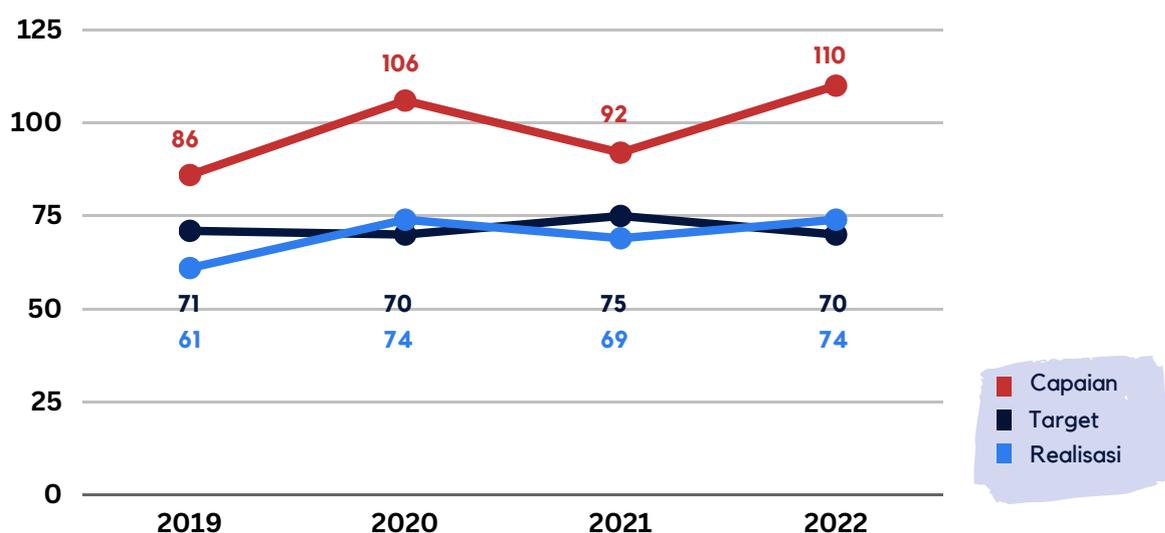
■ Capaian
■ Target
■ Realisasi

Sasaran 1: Indikator 2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tabel 20. Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2019	2020	2021	2022		
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86%	106%	92%	67%	74%	110%

Grafik 3. Persentase Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2022



Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capaian kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami fluktuasi yaitu :

1. Tahun 2019 capaian 86% dari perkara yang diputus 70 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 43 perkara (61%).
2. Tahun 2020 capaian 106% dari perkara yang diputus 61 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 45 perkara (73%).
3. Tahun 2021 capaian 92% dari perkara yang diputus 55 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 38 perkara (69%).
4. Tahun 2022 capaian 110% dari perkara yang diputus 66 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 49 perkara (74%).

Fluktuasi pada indikator ini turut dipengaruhi oleh sulitnya menetapkan target karena indikator ini belum sepenuhnya berada dalam kontrol unit kerja. Namun demikian PTA Padang terus berusaha agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, terbukti dari realisasi indikator ini tidak pernah kurang dari 60 % dan dari 4 tahun terakhir, Tahun 2022 merupakan realisasi tertinggi dari indikator ini yaitu 74 % dengan capaian 110% dari target.

Sasaran 1: Indikator 3 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 21. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2019 s.d 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2019	2020	2021	2022		
1	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	100%	103%	98%	98%	100%

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah 98%. Realisasi kinerja indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi pelayanan publik dengan survey yang telah dilakukan periode Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2022 oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara e-survey dengan respondennya antara lain seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai stakeholder terbesar yang menerima layanan PTA Padang. Selain itu survey juga dilakukan terhadap stakeholder dari eksternal melalui optimalisasi PTSP PTA Padang. Pengolahan lengkap data survey hingga menghasilkan index persepsi stakeholder tersedia pada Laporan Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dari hasil pengukuran diperoleh Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 98. Dengan demikian, kinerja indikator ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kerjanya adalah $(98\%/98\%) \times 100\% = 100\%$.

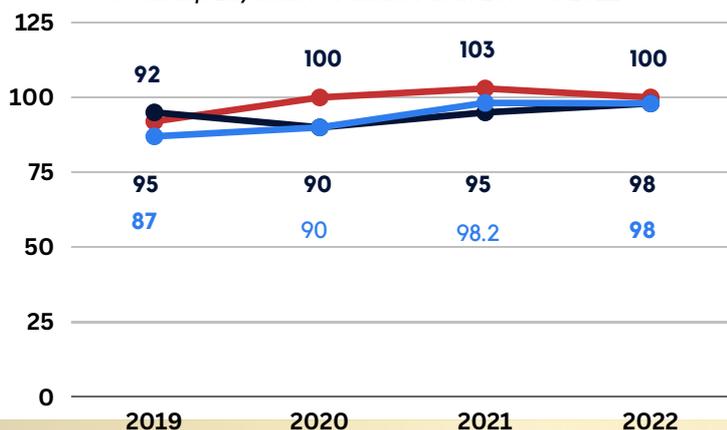
Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capaian kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2019 capaian 92%.
2. Tahun 2020 capaian naik menjadi 100%
3. Tahun 2021 capaian naik kembali menjadi 103%
4. Tahun 2022 capaian 100%. turunya capaian karena adanya kenaikan target, namun secara realisasi sama dengan tahun sebelumnya.

Dari perbandingan capaian 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2022 dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada stakeholder yang menerima layanan PTA Padang.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah: Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online.

Grafik 4. Persentase Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2019 s.d 2022



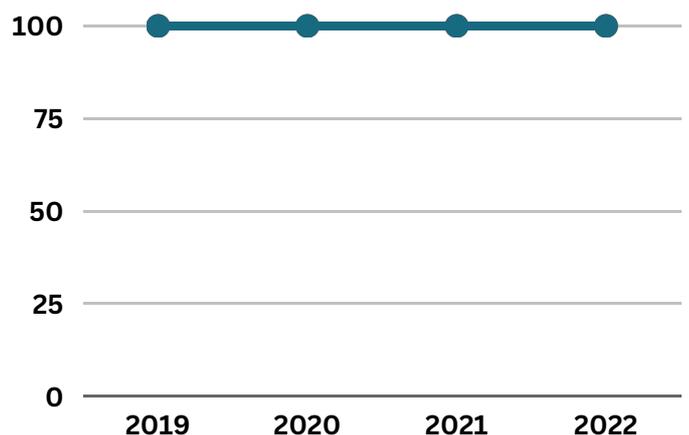
Sasaran 2: Indikator 1 Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 22. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2019	2020	2021	2022		
Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capaian kinerja salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu selalu mencapai target. Tahun 2022 pada indikator ini Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam penyampaian Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi dan melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat Banding mahkamah Agung. Berikut gambaran jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu ke pengadilan agama pengaju pada 3 tahun terakhir.

Grafik 5. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2022



Tabel 23. Keadaan Perkara dan Salinan Putusan yang dikirim Tahun 2019 s.d 2022

No	Tahun	Masuk	Sisa Tahun Lalu	Putus	Salinan Putusan Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
1	2019	64	5	64	69
2	2020	61	0	61	61
3	2021	55	0	55	55
4	2022	66	0	66	66

Capaian Kinerja Indikator Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu dari Tahun 2019 s.d 2022 selalu konsisten 100%. Perkara yang diputus akan langsung dibuat pengantar dan dikirim ke pengadilan agama pengaju pada hari yang sama. Hal ini menunjukkan terwujudnya efektifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengirim salinan putusan perkara ke Pengadilan Pengaju.



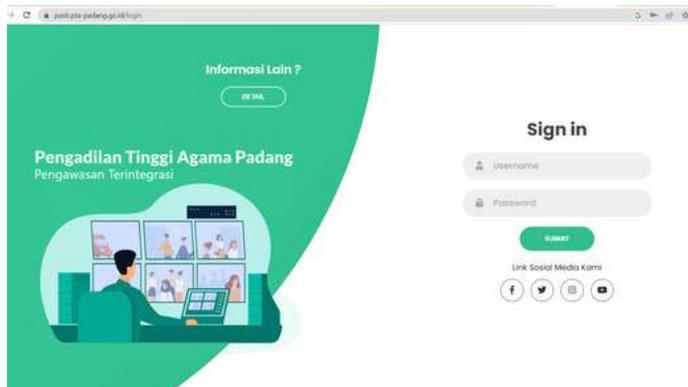
Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Indikator Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan merupakan IKU tambahan yang mengakomodir tugas dan fungsi Pendukung Pengadilan Tingkat Banding. Indikator ini telah ada dalam Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Padang namun karena bukan menjadi tugas utama Peradilan maka sebelum tahun 2022 belum dilakukan pengukuran. Pengukuran capaian kinerja baru dilakukan pada tahun 2022 sebagai bentuk penyempurnaan Laporan Kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya dalam rangka mewujudkan tujuan Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Tabel 24. Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Tahun 2019 s.d 2022

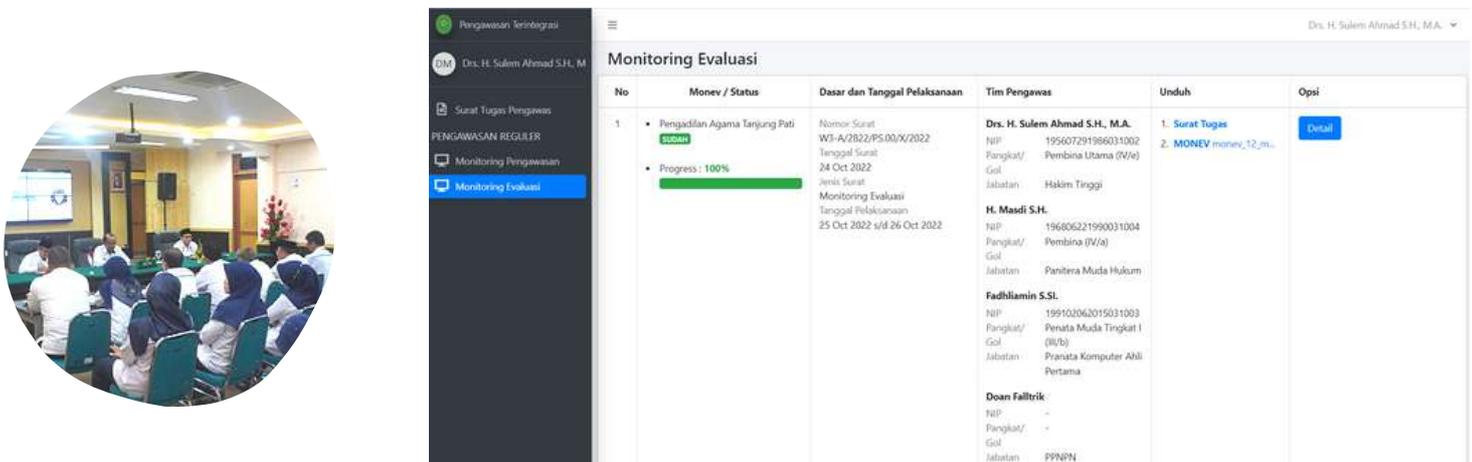
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2019	2020	2021	2022		
Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gambar 9. Aplikasi PASTI Pengadilan Tinggi Agama Padang



Pengadilan Tinggi Agama Padang terus berupaya meningkatkan kinerja dan berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Salah satu inovasi yang dilakukan PTA Padang adalah dengan menggunakan Aplikasi Pengawasan Terintegrasi (Aplikasi PASTI). Dengan Aplikasi ini Pengawasan yang dilakukan dapat terdokumentasi dengan baik serta dapat di monev secara berkelanjutan.

Gambar 10. Monev dalam Aplikasi PASTI Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Tabel 25. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2019 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2019	2020	2021	2022		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	98.99	72.24	83.66	85	96.56	114%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan IKU Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Indikator ini belum diperjanjikan pada tahun 2022, namun telah ada dalam dokumen Rentra 2020-2024 PTA Padang. Untuk menyempurnakan Laporan Kinerja dan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi LHE Sakip PTA Padang tahun 2021 agar sasaran Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding dapat digambarkan kinerjanya maka indikator ini pada tahun 2022 diukur kinerjanya dan dilaporkan pada Laporan Kinerja. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan nilai IKPA yang cukup signifikan dikarenakan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terhadap kondisi tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya menekan laju penularan. Pada bulan Maret 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan (COVID-19). Dengan adanya Pandemi COVID-19 dan *refocusing* anggaran, pengelola keuangan pada satuan kerja (satker) sebagai ujung tombak dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil meningkatkan capaian nilai IKPA, hingga pada Tahun 2022 Nilai akhir IKPA DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar 96.56.

Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Tabel 26. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2019 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2019	2020	2021	2022		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	96.93	92.15	88.05	93	99.17	107%

Sama dengan Indikator lain pada sasaran Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI), Indikator ini juga baru diukur pada tahun 2022. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen mengalami penurunan pada 2020 dan tahun 2021. Namun, Pada tahun 2022 nilai IKPA DIPA 01 pada bulan Desember Tahun 2022 naik signifikan dan berhasil mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih penghargaan sebagai satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran kategori Satker Non Kementerian Keuangan (Konversi 100%) Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan nilai 99,17.

3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET JANGKA MENENGAH
				2020	2021	2022	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	98%	100%
		2	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	73%	69%	74%	68%
		3	Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90	95	98	95
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)	1	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%	100%	100%	100%
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72,24	83,66	96.56	90
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	92.15	88.5	99.17	95

Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 2020-2024 seperti yang terlihat pada tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mampu berada diatas target jangka menengah. Selain itu juga terdapat indikator yang nilai realisasi kinerjanya sama dengan target jangka menengah yakni pada Indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu serta Indikator Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan.

Sasaran 1: Indikator 1 Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 28. Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	98%	98.67%	100%

Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait dengan perbandingan capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 s.d 2022 dengan target jangka menengah terlihat bahwa capaiannya masih dibawah target jangka menengah. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 rata rata adalah 98,67%. Hal ini terjadi karena dari 66 perkara terdapat 1 perkara di tahun 2022 yang diselesaikan tidak tepat waktu. Adanya putusan sela tingkat banding agar perkara tersebut di periksa kembali di Pengadilan Tingkat pertama menjadi sebuah tantangan bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang kedepan bagaimana agar hal ini tidak melewati maksimal waktu penanganan perkara tingkat banding 3 bulan. Hal ini menjadikan Indikator ini memiliki aspek *achievable*. Penetapan target dengan target maksimal 100% menunjukkan, penetapan target yang sangat sangat menantang (*very challenging goals*) memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja organisasi.

Sasaran 1: Indikator 2 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 29. Perbandingan Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	75%	74%	73%	68%

Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait dengan perbandingan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 s.d 2022 dengan target jangka menengah memperoleh hasil yang cukup memuaskan, terlihat dari nilai rata-rata realisasi dari 2020 s.d 2022 sebesar 73% lebih tinggi dibandingkan dengan target realisasi jangka menengah sebesar 68%. Walaupun demikian penetapan target kinerja harus diukur dengan baik karena Indikator ini tidak sepenuhnya dibawah kendali unit kerja.

Sasaran 1: Indikator 3 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tabel 30. Perbandingan Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	95	98	94.33	95

Pada 3 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait perbandingan capaian index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020 s.d 2022 dengan target jangka menengah masih dibawah target. Rata rata capaian indikator ini adalah 94, 33. Namun jika dilihat dari awal tahun renstra, Kepuasan Stakeholder selalu meningkat. Dan pada pengukuran tahun ketiga Renstra 2020-2024 capaiannya dapat melewati target jangka menengah. Target 95 merupakan target yang menantang bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk dapat diwujudkan. Namun dengan capaian realisasi tahun 2022 yang cukup tinggi, maka Target Jangka menengah tersebut optimis akan dicapai pada akhir tahun periode Renstra 2020-2024.

Sasaran 2: Indikator 1 Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 31. Perbandingan Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sampai dengan tahun ke 3 periode renstra 2020-2024 realisasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selalu konsisten 100%, sehingga capaian rata rata tahun 2020 s.d 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang menargetkan target maksimal yakni 100%, maka dengan dengan komitmen pelaksanaan sesuai dengan SOP dan didukung oleh SDM yang baik serta fasilitas pendukung yang memadai, maka target jangka menengah 100% optimis dapat dicapai. Walaupun target selalu dapat dicapai dengan realisasi maksimal 100% dan terlihat mudah untuk di raih namun indikator ini sesungguhnya membutuhkan komitmen dan kerja sama mewujudkannya. Indikator ini merupakan salah satu program pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan.

Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Tabel 32. Perbandingan Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%

Pada 3 tahun terakhir ini kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait perbandingan capaian index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020 s.d 2022 dengan target jangka menengah memiliki realisasi yang sama yaitu sebesar 100%. Indikator ini baru dilakukan pengukuran pada tahun 2022, namun dari hasil monitoring tahun 2020 dan 2021 hasil capaian indikator ini juga terealisasi 100%. Adanya persyaratan keikutsertaan satuan kerja dalam meraih WBK/WBBM pada Zona Integritas yang antara lain mewajibkan satuan kerja menindaklanjuti temuan Pengawasan 100%, maka untuk target jangka menengah dengan target 100% optimis akan dapat dicapai.

Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Tabel 33. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72,24	83,66	96,56	84	90

Capaian realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2020 s.d 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah masih jauh dari target. Kondisi pandemi covid 19 sangat mempengaruhi capaian Indikator ini pada Tahun 2020 dan 2021. Rata rata realisasinya 3 tahun terakhir sebesar 84. Namun Capaian tahun 2022 dapat naik sangat signifikan dari 83,66 pada tahun 2021 naik menjadi 96,56 pada tahun 2022 atau naik 12,9 poin. Capaian Tahun 2022 ini jauh melampaui target jangka menengah 90. Hal ini menjadikan target jangka menengah Indikator ini *achievable* untuk di capai pada akhir periode renstra.

Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Tabel 34. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen tahun 2020 s.d 2022 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			RATA-RATA 2020 s.d 2022	JANGKA MENENGAH
	2020	2021	2022		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	92.15	88.5	99.17	93.27	95

Capaian realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen tahun 2020 s.d 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah masih berada sedikit dibawah target jangka menengah. Rata rata capaian realisasinya dalam 3 tahun terakhir 93,27 sedangkan target jangka menengahnya sebesar 95. Kondisi Pandemi Covid 19 pada tahun pertama periode Renstra 2020-2024 masih mempengaruhi capaian kinerja pada tahun keduanya. Namun dengan penetapan meraih penghargaan di berbagai bidang sebagai salah satu program kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Tahun 2022, membawa hasil yang luar biasa. Melalui penerapan Strategi Pencapaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil memperoleh nilai 99,17 atau 4 point diatas target jangka menengah. Dengan hasil ini, target jangka menengah akan dapat dicapai pada akhir tahun periode renstra.

4

MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

Standar Nasional tahun 2022 terhadap IKU Pengadilan Tinggi Agama Padang diperoleh dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target IKU dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Selain itu untuk mengetahui capaiannya juga dilakukan perbandingan dengan beberapa Pengadilan Tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Sasaran 1: Indikator 1 Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 35. Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI PTA PADANG	CAPAIAN PTA PADANG
		PTA PADANG	NASIONAL (MA-RI)		
1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	98%	98%

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, tanggal 13 Maret 2014, mengatur bahwa penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasasi perkara. Mengacu pada Surat Edaran tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pengadilan Tinggi Agama Padang masih ada yang dibawah standar yang ditetapkan Mahkamah Agung. Selain itu jika melihat perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan target Nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung bahwa capaiannya juga masih dibawah standar nasional. Mahkamah Agung menargetkan capaian terhadap indikator ini sebesar 100%. sedangkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2022 sebesar 98%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh sifat dan keadaan perkara tertentu yakni adanya 1 perkara dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Untuk melihat kinerjanya secara Nasional Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan perbandingan capaian kinerja dengan 2 Pengadilan Tingkat Banding lainnya maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN
1	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	95%	99%	98%	98,67%	100%	98%	103,86%	101%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap Indikator ini harus lebih ditingkatkan. Target yang ditetapkan sebesar 100% (sama dengan target Nasional) namun dibutuhkan langkah-langkah dan strategi guna mengantisipasi adanya perkara yang mempunyai sifat dan keadaan tertentu seperti adanya putusan sela tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara di tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara tersebut tidak melewati batas maksimal penyelesaian perkara di tingkat banding.

Sasaran 1: Indikator 2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Tabel 37. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI PTA PADANG	CAPAIAN PTA PADANG
		PTA PADANG	NASIONAL (MA-RI)		
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	67%	50%	74%	110%

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Standar Nasional terlihat bahwa capaian Realisasinya lebih tinggi dari Standar Nasional. Realisasinya mencapai 74% atau hampir 25% lebih tinggi dari target Mahkamah Agung. Capaian ini menjadi indikasi bahwa putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Padang telah sesuai harapan dan sebagian besar dapat memenuhi rasa keadilan para pihak berperkara. Sementara itu perbandingan capaian kinerja PTA Padang dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 38. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN
1	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	67%	60%	65%	74%	59,11%	65%	110%	98,52%	100%

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Medan terlihat bahwa dari target dan realisasi, PTA Padang berhasil meraih capaian tertinggi.

Sasaran 1: Indikator 3 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tabel 39. Perbandingan Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI PTA PADANG	CAPAIAN PTA PADANG
		PTA PADANG	NASIONAL (MA-RI)		
1	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	80	98	100%

Capaian Realisasi Kinerja Indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Standar Nasional. Target Mahkamah Agung pada Indikator ini adalah 80.

PTA Padang dapat merealisasikan target index 98 sehingga capaiannya menjadi 100%. Berikut perbandingan Realisasi Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan PTA Padang dibandingkan dengan 2 Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN
1	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	98	85	92	98	107,39	97,64	100%	126%	106%

Sasaran 2: Indikator 1 Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 41. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI PTA PADANG	CAPAIAN PTA PADANG
		PTA PADANG	NASIONAL (MA-RI)		
1	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	20%	100%	100%

Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu jika dibandingkan dengan target Mahkamah Agung memiliki capaian kinerja yang jauh lebih tinggi. Standar Nasional hanya menargetkan capaian 20%. Capaian Kinerja PTA Padang Tahun 2022 pada indikator ini sebesar 100%. Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian 2 (dua) satker Tingkat Banding lainnya didapat hasil capaian kinerjanya dapat terealisasi maksimal yakni 100% seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 42. Perbandingan Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lain

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN	PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN
1	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Perbandingan Indikator Persentase terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan dengan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya data secara Nasional. Hal ini terjadi karena Indikator ini merupakan Indikator Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Sedangkan untuk membandingkan dengan tingkat banding lainnya (PTA Jakarta dan PTA Medan) juga tidak didapatkan data karena perbedaan rumusan.

Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Perbandingan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Standar Nasional dilakukan dengan membandingkan Nilai capaian Indikator ini pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Pengadilan Tingkat Banding Lainnya.

Tabel 43. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2022 dengan Tingkat Banding Lainnya

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	96,56	87,89	88,26

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang jika dibandingkan dengan PTA Jakarta dan PTA Medan memiliki nilai yang lebih baik. Tantangan pencapaian target pada indikator ini, sebagian besar terletak pada kesesuaian antara Perencanaan dan Realisasi Anggaran. Dengan anggaran yang dikelola tidak terlalu besar, jika rencana pencairan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaannya, maka akan sangat berpengaruh pada penilaian (Deviasi Halaman III DIPA).

Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Perbandingan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen dengan Standar Nasional dilakukan dengan membandingkan Nilai capaian Indikator ini pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Pengadilan Tingkat Banding Lainnya. Hal ini dilakukan karena tidak ada informasi standar Nasional yang diperoleh. Namun secara keseluruhan, maksimal capaian Indikator ini adalah bernilai 100. Jika dilihat dari nilai maksimal maka nilai Indikator Pelaksana Anggaran Program Dukungan Manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang masih kurang 0,83. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Pengadilan Tingkat Banding Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 dengan Pengadilan Tingkat Banding Lainnya

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
		PTA PADANG	PTA JAKARTA	PTA MEDAN
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	99,17	93,35	88,62

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen jika dibandingkan dengan Nilai Capaian Pengadilan Tingkat Banding Lainnya yakni Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nilai capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang lebih Unggul dengan raihan nilai 99,17. Capaian Kinerja pada indikator ini sangat baik dan hampir mencapai nilai sempurna.

Sasaran 1: Indikator 1 Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 66 perkara yang diputus, 65 perkara diputus tepat waktu dan terdapat satu perkara yang tidak tepat waktu atau diputus melebihi 3 bulan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 98%. Tidak tercapainya target tahun 2022 pada indikator ini disebabkan oleh adanya 1 (satu) perkara dengan perintah pemeriksaan tambahan di Pengadilan Pengaju oleh Hakim melalui putusan sela. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dalam rumusan Kamar Agama dinyatakan Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara.

Di Pengadilan pengaju ternyata pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu selama 91 hari kalender, sehingga perhitungan waktu penyelesaian perkaranya semenjak mulai terdaftar sampai putus memakan waktu selama 110 hari kalender atau melewati waktu maksimal 3 bulan. Terhadap kondisi ini diperlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya serta selalu melakukan monev sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu juga diperlukan koordinasi yang baik dengan pengadilan pengaju sehingga kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan penyelesaian perkara karena adanya putusan sela untuk melakukan pemeriksaan di Pengadilan Agama Pengaju. Walaupun tidak dapat memenuhi target, namun kinerja dari Indikator ini dapat dikatakan baik karena 98% perkara di pengadilan Tinggi Agama Padang dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau lebih cepat dari aturan maksimal 3 (tiga) bulan. Berdasarkan SOP penyelesaian perkara PTA Padang, sejak perkara diterima, dan didaftar sebagai perkara banding, maksimal pada hari kedua dan pada hari ketiga telah ditetapkan Majelis hakimnya, dan rata-rata di PTA Padang pada hari pertama perkara yang diterima tahun 2022 sudah di tetapkan Majelis hakimnya. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat penyelesaian perkara tepat waktu. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan melalui rapat koordinasi secara berjenjang untuk memberikan motivasi agar penyelesaian perkara sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat terlaksana tepat waktu.

Sasaran 1: Indikator 2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2022, berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari 66 perkara yang diputus sebanyak 49 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi atau terealisasi sebesar 74%. Sehingga jika dibandingkan dengan target 67%, capaiannya mencapai 110%. Keberhasilan pada indikator ini menggambarkan bahwa kualitas putusan yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sangat baik, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para pihak pencari keadilan. Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara "Putusan" dan "Hakim" merupakan dua hal yang tak terpisahkan, karena putusan pengadilan adalah produk Hakim maka putusan berkualitas mencerminkan Hakim yang berkualitas. Bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum, putusan Hakim yang berkualitas baginya tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan.



Dari Capaian Kinerja ini dapat dianalisa penyebab keberhasilan pencapaian target, yaitu Konsistensi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam menggunakan SOP penyelesaian perkara dan didukung dengan adanya aplikasi SIPP yang sangat membantu dalam kinerja penyelesaian perkara. selain itu elaksanakan kegiatan Bedah Berkas dan Pemeriksaan Teknis Yustisial secara konsistensi dan berkelanjutan kepada hakim dan aparat peradilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang turut menjadi penyebab putusan hakim menjadi semakin berkualitas.

Sasaran 1: Indikator 3 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Pada Indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target). Dari target 98 dapat direalisasikan 98. Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan kualitas pelayanan kepada stakeholder yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang antara lain Pengadilan agama se-Sumatera Barat yang diberikan oleh supporting unit sangat baik, sehingga menimbulkan kepuasan pada pengadilan agama. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Padang juga memberikan pelayanan kepada stakeholder baik dari internal maupun dari eksternal pengadilan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti memberikan informasi yang jelas mengenai proses berperkara, jadwal sidang, dan berbagai informasi tentang pengadilan lainnya melalui website maupun media sosial resmi instansi.



Peningkatan Optimalisasi peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Padang juga turut dilakukan. PTSP dibentuk dengan maksud mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan. Menjaga independensi dan imparialitas aparat peradilan. Kualitas pelayanan yang baik dapat dihasilkan oleh SDM yang berkualitas dan profesional serta menggunakan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan. Personil pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan serta petugas PTSP Pengadilan Tinggi Agama Padang selalu konsisten menggunakan SOP pelayanan dan didukung dengan aplikasi pendukung pada bagian supporting unit.

Sasaran 2: Indikator 1 Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Pada indikator salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu mencapai 100%. Keberhasilan pada indikator ini pertama dikarenakan pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh hakim dan fungsional kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga salinan putusan yang diambil dari putusan asli produk hakim tinggi bisa langsung dibuat dan dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu. Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah sudah adanya SOP yang baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDM hakim dan fungsional kepaniteraan. Kedua, adanya penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan yang sangat menunjang pelaksanaan tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu.



Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Pada indikator persentase terlaksananya pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mencapai realisasi maksimal 100%. Adanya inovasi berupa Aplikasi Pengawasan Terintegrasi (PASTI) semakin mempermudah pelaksanaan monitoring terhadap tindak lanjut Pengawasan yang dilakukan. Selain itu adanya ketentuan pada pengusulan satker dalam penilaian ZI yang mempersyaratkan harus telah menindaklanjuti hasil temuan baik eksternal maupun internal (pengawasan daerah dan pengawasan bidang) turut berperan dalam memaksimalkan capaian pada indikator ini.



Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Padang memperoleh capaian kinerja sebesar 114% (melampaui target). Tahun 2022 PTA Padang menargetkan nilai IKPA DIPA 04 sebesar 85 dan dapat terealisasi dengan nilai 96,56. Kondisi pandemi covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 membuat nilai IKPA DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang mengalami penurunan yang signifikan. Realisasi Nilai IKPA yang hanya masuk kategori cukup, membuat PTA Padang hanya menargetkan nilai IKPA tidak terlalu tinggi dan hanya menargetkan pada kategori baik.

Pada TA 2022, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Adanya perubahan formulasi IKPA 2022, serta keinginan untuk memperbaiki kinerja Anggaran yang kurang baik pada tahun 2020 dan 2021, maka pada awal tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang bergerak cepat dengan memasukkan materi Sosialisasi Reformulasi IKPA 2022 pada kegiatan Bimtek PNPB dengan peserta dari PA Se-sumatera Barat. Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat serta dari KPPN Padang. menyampaikan strategi pencapaian nilai IKPA tahun 2022 yang optimal. Dalam Kegiatan Bimtek ini juga disampaikan langkah-langkah strategi pencapaian nilai IKPA tahun 2022 yang optimal. Peningkatan pemahaman tentang IKPA dari Kegiatan Sosialisasi dan disertai penerapan langkah langkah strategis serta konsultasi berkelanjutan dengan pihak KPPN dan Kanwil Perbendaharaan Sumatera Barat menjadi kunci keberhasilan PTA Padang meningkatkan nilai IKPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Meski nilai kinerja Indikator ini telah bernilai sangat baik, namun masih di perlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan perbaikan. Perbaikan diperlukan pada salah satu indikator penilaian IKPA DIPA 04 yaitu pada indikator Deviasi Hal III DIPA. Langkah strategisnya yang telah dilakukan antara lain melakukan review rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran dan menyelaraskan Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulan. Namun padatnya kegiatan pada triwulan yang telah direncanakan, membuat perencanaan yang telah dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Gambar 11. Sosialisasi PNPB
Pengadilan Tinggi Agama Padang



Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen, Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 berhasil melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 107%. Target Nilai IKPA Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) sebesar 93 dapat direalisasikan 99,17. Sama dengan Indikator Nilai IKPA Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indikator Nilai IKPA Program Dukungan Manajemen juga mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021. Makin baiknya kondisi Indonesia dalam menghadapi pandemi covid 19 pada tahun 2022 membuat program kerja dan Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Keberhasilan Indikator ini tidak lepas dari terlaksananya langkah langkah strategis pada 8 indikator dalam penilaian IKPA. Kualitas perencanaan Anggaran berhasil meraih nilai sempurna 100 karena selalu dilakukan review rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran dan menyelaraskan Halaman III DIPA dengan target serta melakukan review atas DIPA secara periodik. Kualitas Pelaksanaan Anggaran meraih nilai 98,43 yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP TUP.

Gambar 12. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	010	005	401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	Nilai	100.00	100.00	99.57	100.00	100.00	92.57	100.00	100.00	99.17	100%	99.17
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.91	10.00	10.00	9.26	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		98.43					100.00			

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Pada Monitoring Pengelolaan UP dan TUP triwulan I, Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya memperoleh nilai 69,16 dari maksimal Nilai 100. Hal ini terjadi karena masih belum mengetahui hal hal yang menjadi penilaian pada Pengelolaan UP TUP. Melalui kegiatan Sosialisasi dan konsultasi strategi peningkatan nilai capaian IKPA dengan mitra kerja (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat dan KPPN Padang) secara berkelanjutan diketahui penyebab rendahnya capaian nilai pada Pengelolaan UP dan TUP disebabkan oleh pengembalian TUP yang kurang dari 50 persen. Untuk mengatasi kendala ini maka Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan evaluasi meliputi menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan satker dan menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien. Dengan langkah langkah strategis tersebut, nilai pengelolaan UP dan TUP dapat meningkat dan diakhir tahun meraih nilai 92,57. Pada Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, Capaian Output bernilai 100, langkah strategis yang dilakukan antara lain menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin.

Keberhasilan Indikator Nilai IKPA Program Dukungan manajemen tercermin dari tingginya capaian realisasinya sehingga mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Padang meraih Penghargaan sebagai satuan kerja dengan kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kedua kategori satker Non Kementerian Keuangan (Konversi 100)% Tahun Anggaran 2022. Dukungan dan komitmen bersama dari pimpinan dan semua unit di Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menjalankan kegiatan dan program kerja sesuai yang direncanakan menjadi kunci keberhasilan indikator ini.

6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran 1: Indikator 1 Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 45. Perkara diputus dan masuk serta jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Putus Tepat waktu	Masuk	%	SDM Hakim	SDM PP
1	2018	48	54	89	12	11
2	2019	70	64	109	11	9
3	2020	61	61	100	11	13
4	2021	55	55	100	10	16
5	2022	65	66	98	11	17

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah SDM hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berikut tabel penyelesaian perkara 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 s.d 2022, yaitu dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara masuk. Gambaran efisiensi sumber daya terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2018 s.d 2022 dengan membandingkan perkara masuk dan putus dengan jumlah-

SDM Hakim dan Fungsional Kepaniteraan (Panitera Pengganti).

- Tahun 2018 = 48 : 54 (89%) jumlah Hakim 12 orang dan Panitera Pengganti 11 orang.
- Tahun 2019 = 70 : 64 (109%) jumlah Hakim 11 orang dan Panitera Pengganti 9 orang.
- Tahun 2020 = 61 : 61 (100%) jumlah Hakim 11 orang dan Panitera Pengganti 13 orang.
- Tahun 2021 = 55 : 55 (100%) jumlah Hakim 10 orang dan Panitera Pengganti 16 orang.
- Tahun 2022 = 65 : 66 (98%) jumlah Hakim 11 orang dan Panitera Pengganti 17 orang.

Penyelesaian perkara tepat waktu pada 5 tahun terakhir di Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah sangat baik dalam melakukan efisiensi pemanfaatan SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti), terbukti dengan penyelesaian perkara sudah sangat baik kecuali pada tahun 2018, capaiannya 89% hal itu disebabkan pengurangan SDM hakim yang pada tahun sebelumnya 16 orang berkurang menjadi 12 orang hakim dan perkara yang belum diputus merupakan perkara yang diterima pada akhir tahun.

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang capaian penyelesaian perkara tepat waktu 98%, dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) meskipun capaian untuk tahun 2022 terjadi koreksi hal ini disebabkan karena adanya satu perkara dengan perintah pemeriksaan tambahan di Pengadilan Pengaju dengan putusan sela, Oleh Pengadilan pengaju pemeriksaannya memakan waktu selama 91 hari kalender. Namun proses pemeriksaan di tingkat banding oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya selama 19 hari. Total perhitungan perkara tersebut semenjak mulai terdaftar sampai putus memakan waktu selama 110 hari kalender. Kondisi ini menjadikan penurunan capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2022 Namun semua perkara dapat diselesaikan 100%, tanpa ada sisa perkara pada akhir tahun. Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Namun untuk perkara tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut pada Pengadilan Tingkat pertama perlu dilakukan monitoring yang lebih baik lagi sehingga capaiannya dapat ditingkatkan.

Sasaran 1: Indikator 2 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 46. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2020 s.d 2022

Tahun	Jumlah Perkara		SDM Hakim	SDM Panitera Pengganti
	Perkara Banding	Tidak Dimohonkan Kasasi		
2020	61	45	11	13
2021	55	38	10	16
2022	66	49	11	17

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Rata rata perkara yang ditangani oleh 1 orang hakim di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah 6 perkara. Dari 6 perkara tersebut rata rata 4 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada 3 tahun terakhir dapat dikatakan cukup banyak/ para pihak menerima putusan dengan indikator yaitu diatas 74%. Artinya dalam 3 tahun terakhir kualitas putusan yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sangat berkualitas dan memenuhi rasa keadilan, sekalipun pada tahun 2022 komposisi jumlah hakim tinggi di awal tahun berjumlah 10 orang dan pada akhir tahun bertambah jadi 11 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Dan Panitera Pengganti di awal tahun 16 orang dan pada akhir tahun menjadi 17 orang.

Sasaran 1: Indikator 3 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Analisa terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya pada indikator index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan dapat terlihat pada nilai unsur pelayanan yang semuanya diatas 3,89 pada skala 4 atau jika dikonversi ke skala 100, berada diatas 98. Dimana pada tabel mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, mutu pelayanan A diperoleh untuk nilai interval konversi SKM (Survey Kepuasan masyarakat) pada kisaran 88,31 – 100. Dengan mutu pelayanan A, didefenisikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki kinerja unit pelayanan sangat baik. Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, dengan didukung oleh SDM yang berkualitas dan profesional serta banyaknya inovasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sangat membantu dalam kinerja pemberian pelayanan. Seperti yang terlihat pada hasil survey, Unsur pelayanan tertinggi dari Survei Pelayanan Publik adalah U4 Kesesuaian biaya pelayanan, U5 Kesesuaian produk pelayanan, dan U7 Perilaku petugas dalam pelayanan.

Sementara itu dari Unsur sarana dan prasarana pendukung terdapat beberapa hal yang masih sangat terbatas yakni transportasi menuju kantor dikarenakan letak kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang yang jauh dari pusat kota. Kemudian Air bersih yang tersedia kualitasnya masih kurang baik karena menggunakan air tanah (sumur bor). Genset yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Padang saat ini juga sudah tidak memadai jika terjadi pemadaman listrik karena hanya berkapasitas 30KVA sementara daya listrik PTA Padang saat ini adalah sebesar dimana tanah dasar Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan tanah gambut. Secara umum dari beberapa kesulitan dsumber daya diatas, maka diambil kebijakan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, sambil berusaha setiap tahunnya untuk meminta anggaran agar terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Sasaran 2: Indikator 1 Persentase Salinan putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator pengiriman salinan putusan ke pengadilan agama pengaju tepat waktu dapat terlihat jika kita membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu, Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti) yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berikut gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah pengiriman salinan putusan di Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020 s.d 2022 dengan membandingkan jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti.

Tabel 47. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu serta Jumlah SDM Hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2020 s.d 2022

Tahun	Jumlah Perkara			SDM Hakim	SDM Panitera Pengganti
	Perkara Masuk	Perkara Putus	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu		
2020	61	61	61	11	13
2021	55	55	55	10	16
2022	66	66	66	11	17

Pada 3 tahun terakhir terkait jumlah Salinan yang dikirim ke pengadilan agama pengaju tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dikatakan sudah sangat baik dikarenakan semua Salinan putusan dari perkara yang diputus pada tahun berjalan selalu langsung dikirimkan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu. Hal itu dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir capaian kinerja pada indikator ini selalu 100%. SOP yang sudah baku dan aplikasi SIPP yang dilaksanakan secara konsisten oleh SDM hakim dan bagian kepaniteraan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dari bagian kesekretariatan sangat menunjang pelaksanaan pengiriman salinan putusan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu.

Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Analisa terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya pada persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan jika dilihat dari SDM didapat data bahwa dengan jumlah hakim Tinggi sebanyak 11 orang dan total jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA Padang sebanyak 18 satker, maka 7 orang hakim tinggi mengawasi 2 Pengadilan Agama dan 4 orang hakim tinggi menjadi hakim pengawas daerah untuk 1 Pengadilan Agama.

Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan telah didukung dengan ketersediaan anggaran DIPA 01 sejumlah Rp 160.498.000 dan DIPA 04 sejumlah Rp 334.902.000 dengan realisasi DIPA 01 sebesar Rp 160.411.520 dan realisasi DIPA 04 sebesar Rp 334.543.102. Adanya anggaran pembinaan yang bersumber dari PNPB turut membuat pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu hadirnya berbagai inovasi berbasis IT seperti Aplikasi Pengawasan Terintegrasi (Aplikasi PASTI) semakin mempermudah monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Hasil Pembinaan dan Pengawasan dapat terdokumentasi dengan baik. Ketersediaan fasilitas berupa Internet yang lancar dapat dioptimalisasikan untuk mendukung kinerja.

Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dari sisi SDM, Kegiatan Revisi Anggaran yang menjadi salah satu indikator penilaian IKPA dilakukan pada sub bagian Rencana program dan Anggaran dengan SDM sebanyak 2 orang. Sedangkan Kegiatan Pengelolaan UP dan TUP, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM (kegiatan yang berhubungan dengan pencairan anggaran) dilakukan oleh bagian Sub Keuangan dan Pelaporan dengan jumlah SDM sebanyak 5 orang. Kegiatan Pelaksanaan Anggaran selalu dikomunikasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dengan pengelola kegiatan melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan Hukum ditujukan untuk meningkatkan manajemen peradilan Agama dimana Pelaksanaan Keegiatannya tidak lepas dari peran Hakim Tinggi, Bagian Kepaniteraan dan Tim IT. Jumlah Hakim sebanyak 11 orang dan kepaniteraan sebanyak 23 orang (17 orang Panitera Pengganti 6 orang staf dan tenaga IT).

Ketersediaan fasilitas berupa Internet yang lancar dapat dioptimalisasikan untuk mendukung kinerja indikator ini. Namun masih terdapat kendala sarana berupa kurangnya ketersediaan laptop pada sub bagian program dan anggaran dan sub bagian keuangan dan pelaporan (Kesekretariatan) dimana dalam menjalankan tugas dan kegiatannya sangat dibutuhkan alat pengolah data yang bersifat mobile. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan optimalisasi sarana yang ada dengan memaksimalkan waktu kerja di kantor menggunakan PC, dan untuk tugas yang bersifat *mobile* dilakukan penggunaan Laptop secara bergantian, sambil berusaha setiap tahunnya untuk meminta anggaran agar terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen, dari sisi SDM Indikator ini melibatkan seluruh SDM yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Padang sebanyak 51 orang. Realisasi Indikator ini ditujukan pada kinerja kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Sama halnya dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indikator ini juga memerlukan sarana dan prasarana berupa kelancaran internet dan Ketersediaan alat pengolah data yang mobile. Untuk kelancaran internet telah terpenuhi dengan baik namun untuk ketersediaan laptop masih belum memadai. Walaupun ada beberapa kendala dalam Penggunaan Sumber daya namun capaian indikator ini tetap dapat dimaksimalkan.

7

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 1: Indikator 1 Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu ini sangat ditunjang oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA 04 serta Program Dukungan Manajemen DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Selain itu sarana dan prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara tepat waktu, diantaranya adalah: alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP, dan Penyediaan fasilitas internet.



Sasaran 1: Indikator 2 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, program yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah antara lain secara terjadwal melakukan kegiatan diskusi hukum serta bedah berkas perkara. Selain itu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) dengan sasaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama turut membantu dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang memenuhi rasa keadilan, sehingga berimplikasi terhadap menurunnya upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara banding. Adanya, Kegiatan Bimtek Kompetensi Tenaga Teknis Badan Peradilan serta dukungan manajemen operasional perkantoran turut mendukung peningkatan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu indikator kegiatan tersebut telah menghasilkan putusan perkara banding yang berkualitas yang berkeadilan, sehingga implikasi dari hal tersebut adalah dengan banyak diterimanya putusan hakim dalam tingkat banding

Sasaran 1: Indikator 3 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada indikator indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di tahun 2022 ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara lain karena munculnya inovasi-inovasi Pengadilan Tinggi Agama Padang yang sangat baik dan juga disebabkan oleh Program Dukungan Manajemen pada DIPA 01 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga berjalannya operasional perkantoran dengan baik, Selain itu peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, turut mendukung peningkatan kinerja kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Publik, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan survei kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Survei ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner survei kepada responden terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Yang menjadi responden bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Pengadilan Agama se wilayah hukum Sumatera Barat yang menjadi stakeholder terbanyak dalam menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dengan telah tercapainya kepuasan terhadap pelayanan sesuai target maka Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil mewujudkan harapan stakeholder.



Sasaran 2: Indikator 1 Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Pada indikator pengiriman Salinan putusan ke pengadilan agama pengaju tepat waktu di tahun 2022 ini, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara lain karena Program Dukungan Manajemen dan pada DIPA 01 dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA 04 yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran dengan baik, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan peralatan kantor dan operasional lainnya. Selain itu pada kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, telah mendukung dengan pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan kinerja hakim dan kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam pengiriman Salinan putusan ke pengadilan agama pengaju secara tepat waktu.

Sasaran 3: Indikator 1 Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Pada indikator terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara lain adanya dukungan anggaran dari 2 DIPA yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Padang yakni Anggaran pada Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04). Adanya anggaran pembinaan dan pengawasan turut berperan dalam menciptakan Sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM. Pengawasan dan Pembinaan tidak saja dilakukan secara offline namun juga secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tahun 2022, Pengadilan Tinggi Agama Padang mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana berupa Pengadaan Fasilitas teleconference pada ruang command center. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Padang juga mendapatkan transfer masuk alat pengolah data berupa laptop untuk pejabat struktural Kesekretariatan. Adanya penambahan sarana dan prasarana ini sangat menunjang dalam keberhasilan dalam pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sasaran 3: Indikator 2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada Indeks Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ini dapat tercapai dengan baik dikarenakan terjalinnya kerjasama antar bagian dalam menetapkan rencana dan dalam melaksanakan anggaran. Setiap triwulan dilakukan rapat evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang melibatkan unsur pimpinan. PTA Padang menjalankan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dengan meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi. selain itu juga dilakukan strategi optimalisasi IKPA.

Sasaran 3: Indikator 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen

Sama halnya dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan Hukum, Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen dapat tercapai dengan baik karena terjalinnya kerjasama antar bagian dalam menetapkan dan melaksanakan anggaran serta dukungan pimpinan. Langkah langkah strategis pelaksanaan anggaran berupa peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi. Hal ini lah yang menjadikan nilai IKPA DIPA 01 meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Terbaik Kedua Satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran kategori Satker Non Kementerian Keuangan (Konversi 100%) Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan nilai 99,17.



Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Hasil dari penilaian tersebut dapat membuat kesimpulan bahwa jika nilai realisasi lebih tinggi dari pada target yang telah ditetapkan maka menunjukkan bahwa capaian kinerja semakin baik. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian strategi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Secara umum dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah mencapai keberhasilan dengan baik yang ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja secara strategis yang telah ditetapkan.



REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan Renstra 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pejanjian Kinerja (PK) Pengadilan Tinggi Agama Padang didukung dengan anggaran yang dituangkan dalam 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan 2 Program dengan nilai Pagu Awal sebesar Rp15.136.857.000. Namun pagu anggaran ini mengalami penyesuaian menyusul kebijakan pemerintah terkait refocusing anggaran serta karena adanya revisi antar satker untuk tujuan optimalisasi Anggaran sehingga pagu anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang pada akhir tahun berjumlah sebesar Rp13.964.281.000. Realisasi Anggaran pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 99,65%, 99,93%, dan 99,95%, ini menunjukkan bahwa disetiap tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		(Rp)	(%)	
2022	13.964.281.000	13.957.228.001	99.95	7.052.999
2021	13.091.850.000	13.083.152.021	99.93	8.697.979
2020	13.701.648.000	13.653.098.330	99.65	48.549.670

Grafik.6 Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang



Dalam rangka merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan Renstra 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pejanjian Kinerja (PK) Pengadilan Tinggi Agama Padang didukung dengan anggaran yang dituangkan dalam 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan 2 Program dan nilai Pagu Awal sebesar Rp15.136.857.000. Namun pagu Anggaran ini mengalami penyesuaian menyusul kebijakan pemerintah terkait terjadinya wabah virus Covid-19 di Indonesia serta karena adanya revisi antar satker untuk tujuan optimalisasi Anggaran sehingga pagu anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang pada akhir tahun berjumlah sebesar Rp13.964.281.000. Realisasi Anggaran pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 99,65%, 99,93%, dan 99,95%, ini menunjukkan bahwa disetiap tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang terdiri dari 2 DIPA yaitu:

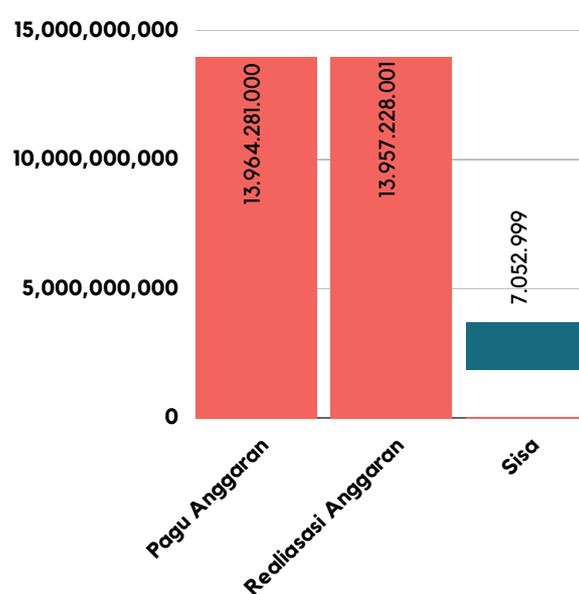
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Adapun Rincian DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:

Belanja Pegawai. Jumlah Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp9.689.190.000,- (sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan, dan uang makan.

- **Belanja Barang.** Jumlah Belanja Barang tahun 2022 sebesar Rp3.959.091.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- **Belanja Barang** meliputi belanja barang operasional dan non operasional yang penggunaannya antara lain untuk pemeliharaan, pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya kegiatan konsultasi, pembinaan dan pengawasan, sedangkan yang non operasional meliputi kegiatan bimbingan teknis kesekretariatan dan administrasi pegawai dan rapat koordinasi.
- **Belanja Modal.** Jumlah Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah). Belanja Modal adalah pengeeluaran yang dilakukan dalam rang pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya pada program ini kegiatannya berupa Pengadaan Alat Pengolah Data dan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

Grafik. 7 Penyerapan Anggaran DIPA 01 Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang



Tabel 49. Realisasi DIPA 01 Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		(Rp)	(%)	
Belanja Pegawai	9.689.190.000	9.686.386.885	99.97	2.803.115
Belanja Barang	3.959.091.000	3.954.855.966	99.89	4.235.034
Belanja Modal	316.000.000	315.985.150	100	14.850
Jumlah	13.964.281.000	13.957.228.001	99.95	7.052.999



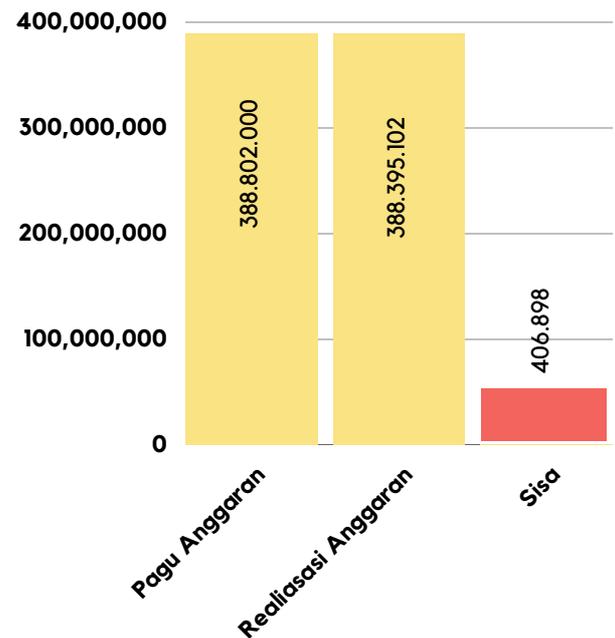
DIPA (04) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

DIPA (04) Badan Peradilan Agama, Anggaran DIPA (04) sebesar Rp388.802.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah), yang meliputi belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama untuk menunjang kegiatan operasional layanan peradilan. Berdasarkan tabel dibawah ini pada tahun 2022 penyerapan Realisasi DIPA 04 adalah sebesar 99,90% yang digunakan untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Tabel 50. Realisasi DIPA 04 Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		(Rp)	(%)	
Belanja Barang	388.802.000	388.395.102	99,9	406.898
Jumlah	388.802.000	388.395.102	99,9	406.898

Grafik. 8 Penyerapan Anggaran DIPA 04 Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang

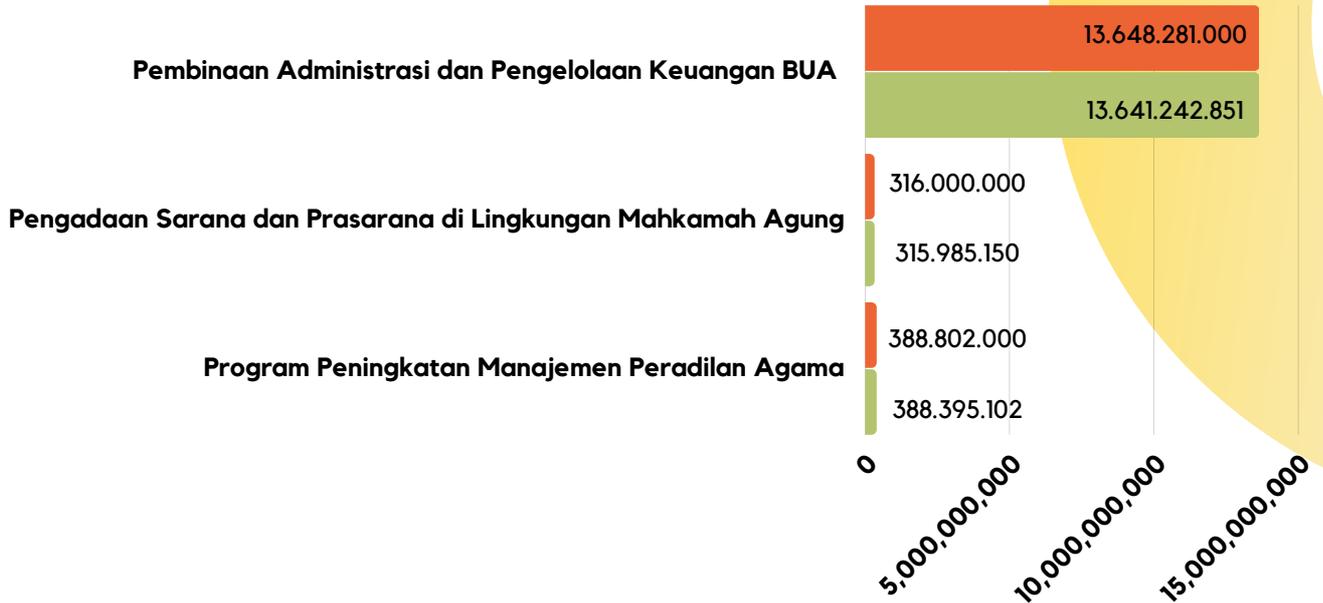


Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 digunakan untuk mendukung tercapainya masing masing Indikator Strategis dengan Program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 51. Realisasi Anggaran Per Program Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2022

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	(%)
1	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	13.648.281.000	13.641.242.851	99.94
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	316.000.000	315.985.150	100
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	388.802.000	388.395.102	99.90

Grafik. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang



1 Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan, dengan sasaran program nya:

1. Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
2. Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif;
3. Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien;
5. Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan;
6. Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan;
7. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
- Peningkatan penggunaan media sosial dalam rangka sosialisasi (kampanye) dan penyampaian informasi tentang peran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan kepada masyarakat dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.
- Mengembangkan teknik survei dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
- Melakukan pembinaan kepegawaian berupa analisis dan evaluasi jabatan.
- Menetapkan standar kinerja individu.

- Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.
- Melaksanakan Pembinaan dan Pendampingan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama dengan hasil WBK pada 2 (dua) Pengadilan Agama Sawahlunto dan Pengadilan Agama Solok.
- Melaksanakan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan selaku koordinator wilayah provinsi Sumatera Barat.

Program Dukungan Manajemen terdiri atas 2 Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Anggaran sebesar Rp13.648.281.000 dapat direalisasikan sebesar Rp13.957.228.001 atau realisasi mencapai 99,95%. Pada kegiatan ini komponennya berupa:

- Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan pegawai;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor;
- Penyelenggaraan non operasional perkantoran yang meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan, kegiatan sosialisasi kepegawaian, kegiatan penatausahaan barang persediaan dan monev SMART, konsultasi, rapat koordinasi, penyelenggaraan kearsipan, /perpustakaan, dokumentasi.

Tabel 52. Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA RI

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		(Rp)	(%)	
Belanja Gaji, Tunjangan, dan Uang Makani	9.689.190.000	9.686.386.885	99.9	2.803.115
Belanja Barang Operasional	3.794.997.000	3.790.764.165	99.89	4.232.835
Belanja Non Operasional	164.094.000	164.091.801	100	2.199

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung dengan Anggaran sebesar Rp316.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp315.985.150 atau mencapai realisasi 100%. Pada Program ini kegiatannya berupa:

- Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi;
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

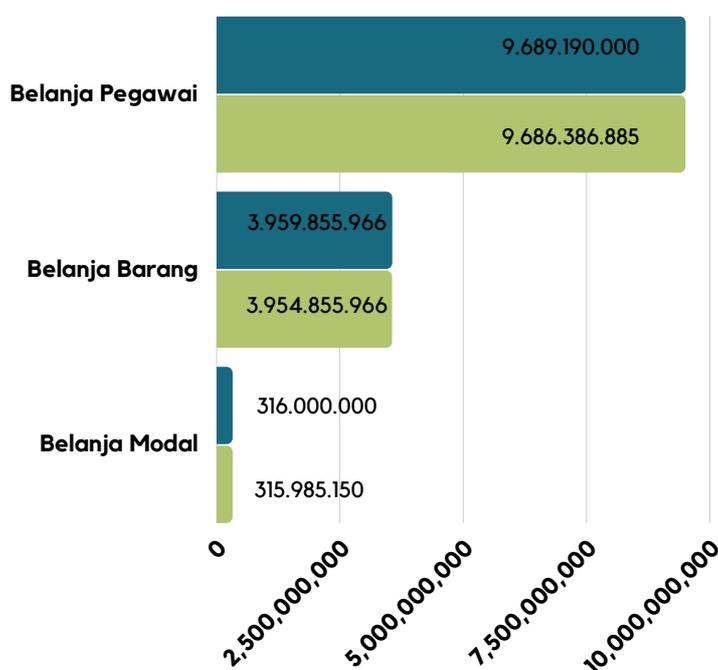


Tabel 53. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01)
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	9.689.190.000	9.686.386.885	2.803.115	99,95
2	Belanja Barang	3.959.855.966	3.954.855.966	3.767.385	99,89
3	Belanja Modal	316.000.000	315.985.150	14.850	100
Jumlah		13.964.281.000	13.957.228.001	7.052.999	99,95

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa capaian realisasi DIPA 01 Badan Urusan administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun anggaran 2022 mencapai 99,95%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya capaian realisasi DIPA 01 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 capaian realisasi adalah sebesar 99,64%. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun terjadi kondisi sulit yakni pandemi Covid-19 di Indonesia, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu menyesuaikan dengan cepat dengan melakukan inovasi dan optimalisasi anggaran. Bentuk inovasi dan optimalisasi tersebut antara lain pada kegiatan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi dan koordinasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan melakukan perjalanan dinas dialihkan dengan sistem daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki. Sedangkan untuk anggarannya dilakukan optimalisasi ke akun pemeliharaan dan penyelesaian pagu minus anggaran pada satker Pengadilan Agama se Sumatera Barat melalui mekanisme Revisi antar satker. Dengan strategi tersebut program yang ditetapkan dapat berjalan dengan kinerja baik dan anggaran dapat terserap dengan optimal.

Grafik. 10 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.01) Tahun Anggaran 2022





Tabel 54. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
1	2022	13.964.281.000	13.957.228.001	99,95
2	2021	13.091.850.000	13.083.152.021	99,93
3	2020	13.701.648.000	13.653.098.330	99,65

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 DIPA 005.01 sebesar 99,95 persen apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Mereviu dan menyempurnakan kebijakan jangka waktu penyelesaian perkara
- Melakukan Pembinaan dan Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
- Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.
- Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaatz) untuk menjangkau lapisan masyarakat.
- Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan Anggaran sebesar Rp310.516.000 dapat direalisasikan sebesar Rp309.462.600 atau realisasi sebesar 99,66%. Pada Program ini sasarannya berupa: Terlaksananya implementasi Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Agama; Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan; Terselenggaranya Bimbingan Teknis Yustisial. Tabel dan grafik berikut ini dapat dilihat anggaran dan realisasi untuk DIPA 04 tahun anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Tabel 55. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.04) Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Realisasi (%)
1	Belanja Barang	388.802.000	388.395.102	406.898	99,90

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa capaian realisasi DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,90% merupakan capaian yang baik. Dimana dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang realisasinya sebesar 98,71%. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 DIPA 005.04 sebesar 99,90% apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (04) BADILAG sebesar Rp 388.802.000. Persentase Salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Untuk pengiriman salinan putusan perkara menggunakan biaya proses dari bagian kepaniteraan. Berikut rincian biaya proses tahun 2022

Tabel 56. Biaya Proses Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan							Selisih
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas Di Bank	Kas di Brankas		
								Uang	Materai	
1	Januari	Biaya Perkara	Rp -	Rp 600.000	Rp 540.000	Rp 60.000	Rp 750.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 750.000
2	Februari	Biaya Perkara	Rp 60.000	Rp 900.000	Rp 920.000	Rp 40.000	Rp 750.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 750.000
3	Maret	Biaya Perkara	Rp 40.000	Rp 1.500.000	Rp 1.400.000	Rp 140.000	Rp 600.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 600.000
4	April	Biaya Perkara	Rp 140.000	Rp 1.050.000	Rp 1.150.000	Rp 40.000	Rp 150.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 150.000
5	Mei	Biaya Perkara	Rp 40.000	Rp 300.000	Rp 280.000	Rp 60.000	Rp -	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp -
6	Juni	Biaya Perkara	Rp 60.000	Rp 150.000	Rp 170.000	Rp 40.000	Rp 150.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 150.000
7	Juli	Biaya Perkara	Rp 40.000	Rp 900.000	Rp 860.000	Rp 80.000	Rp 150.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 150.000
8	Agustus	Biaya Perkara	Rp 80.000	Rp 300.000	Rp 380.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9	September	Biaya Perkara	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 1.360.000	Rp 140.000	Rp 450.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 450.000
10	Oktober	Biaya Perkara	Rp 140.000	Rp 900.000	Rp 960.000	Rp 80.000	Rp 150.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 150.000
11	November	Biaya Perkara	Rp 80.000	Rp 900.000	Rp 920.000	Rp 60.000	Rp 450.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 450.000
12	Desember	Biaya Perkara	Rp 60.000	Rp 900.000	Rp 960.000	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp -	Rp 600.000

Tabel 57. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (005.04)
Tahun Anggaran 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
1	2022	388.802.000	388.395.102	99.90
2	2021	310.516.000	309.462.600	99.66
3	2020	222.046.000	219.176.560	98.71

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi anggaran mengalami perubahan yang mana di tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Padang (DIPA-01) dengan Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

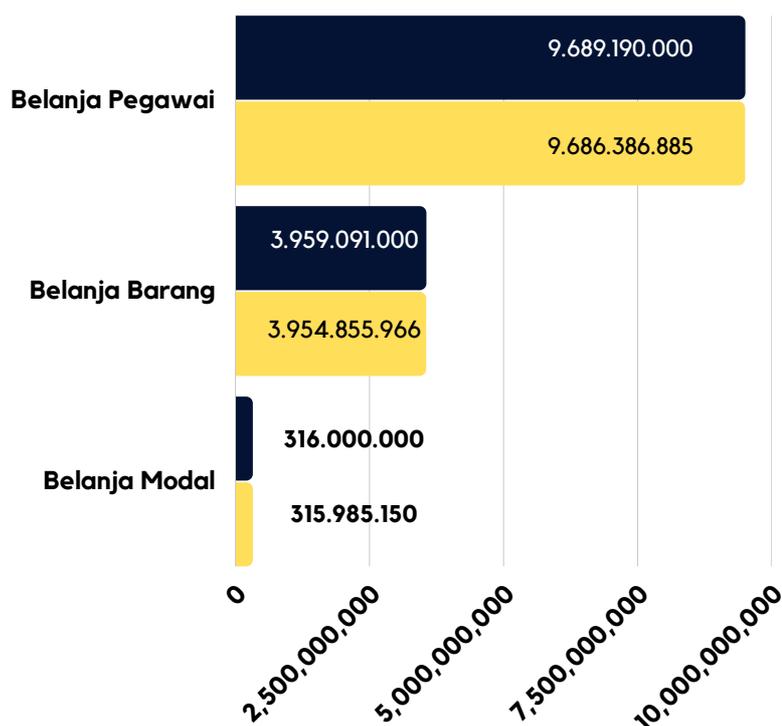
Belanja Pegawai yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan serta uang makan pegawai.

- Rencana Kerja Anggaran. Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Rp 9.689.190.000.
- Pelaksanaan Anggaran. Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2022, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sejumlah Rp9.686.386.885. Dari total anggaran Belanja Pegawai yang telah terealisasi, dapat dilihat bahwa pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 99,95 persen.
- Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp2.803.115 Sisa pagu Belanja Pegawai adalah sebesar 0,05% dari anggaran. Nilai sejumlah itu tidak terpakai, namun semua kegiatan terpenuhi.

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang operasional maupun belanja barang non operasional.

- Rencana Kerja Anggaran Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar Rp3.959.091.000. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memenuhi target kinerja.
- Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2022, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp3.954.855.966. Dari total anggaran Belanja barang yang telah terealisasi, pagu belanja barang telah terserap sebesar 99,89%.
- Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp4.235.034. Dari sisa pagu belanja barang dapat dilihat bahwa sebesar 0,11% anggaran tidak terpakai dari total pagu yang tersedia, namun semua kegiatan yang ditargetkan tercapai.

Grafik. 11 Realisasi (Penyerapan) Anggaran DIPA 01 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022



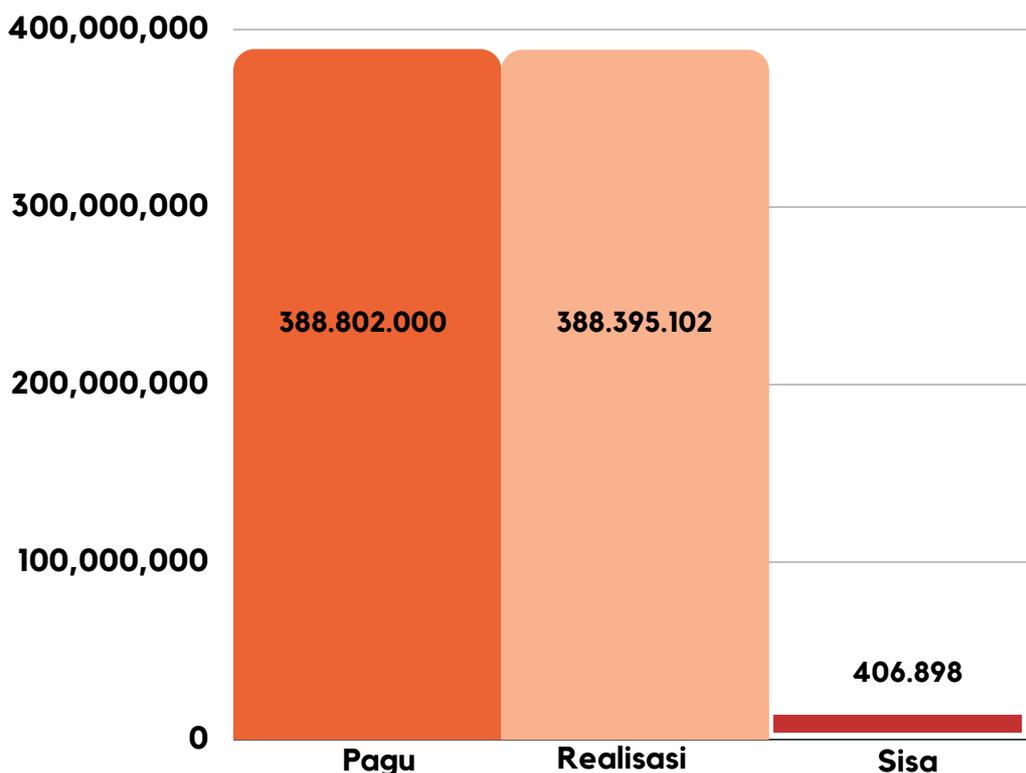
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Selama tahun anggaran 2022, semua satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang mendapat pagu belanja modal peralatan dan mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang lain mendapatkan belanja modal peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal gedung dan bangunan.

- Rencana Kerja Anggaran. Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar Rp316.000.000
- Pelaksanaan Anggaran. Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2022, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp315.985.150. Dari total anggaran Belanja Modal yang telah terealisasi, pagu belanja modal telah terserap sebesar 100%.
- Sisa Anggaran Pelaksanaan. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat efisiensi anggaran sebesar Rp14.800. Dari sisa anggaran tersebut, 0% anggaran tidak terpakai dari total pagu yang tersedia namun target yang direncanakan telah tercapai.

Sedangkan pengelolaan keuangan di Pengadilan Tinggi Agama Padang (DIPA-04) dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sebagai berikut:

- Rencana Kerja Anggaran. Besarnya total anggaran atau pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dalam DIPA-04 Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar Rp388.802.000.
- Pelaksanaan Anggaran. Dari pagu belanja barang DIPA-04 Tahun Anggaran 2022, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp388.395.102. Dari total anggaran DIPA 04 yang telah terealisasi, pagu belanja barang DIPA 04 telah terserap sebesar 99,90%.
- Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran DIPA 04 yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp406.898. Dari total sisa anggaran pagu belanja barang DIPA 04, sebesar 0,1% anggaran tidak terpakai namun target kegiatan dan program sudah tercapai.

Grafik. 12 Realisasi (Penyerapan) Anggaran DIPA 04 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022





BAB IV

Penutup

KESIMPULAN

REKOMENDASI



KESIMPULAN

Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan agama tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2022 dalam rangka layanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai Lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai kawal depan (voorpost) penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan ditunjukkan dengan kinerja baik dalam hal penanganan administrasi perkara yang merupakan core business dari Lembaga peradilan dengan terealisasinya upaya hukum **banding** perkara perdata sesuai prosedur dari Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi 18 (kota/kabupaten).

Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022 ini menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel memiliki 3 indikator, hasil capaiannya adalah:

1. Indikator kinerja presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, realisasinya sebesar 98% sesuai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja 98%.
2. Indikator kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, realisasi sebesar 74% sehingga capaian kinerja 110%.
3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan, memiliki realisasi sebesar 98% sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara memiliki 1 indikator, hasil capaiannya adalah:

1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, realisasi nya sebesar 100%, dan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI, memiliki 3 indikator, hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan realisasi sebesar 100%, dan capaian indikator ini pun juga 100%.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, realisasinya sebesar 96.56, sehingga capaian pada indikator ini sebesar 114%.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen dengan nilai realisasi sebesar 99.17, sehingga capaian pada indikator ini ialah 107%.

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk program:

1. Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran sebesar 99,94%, semua target program tercapai.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, realisasinya sebesar 99,90%, semua target program tercapai.

Capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut karena kerja keras dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang. LKjIP tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa mendatang. Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan upaya perbaikan kedepan pada tahun berikutnya.



REKOMENDASI

Pengadilan Tinggi Agama Padang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022. Berdasarkan reвью Tim Penyusunan LKjIP tahun 2022 ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para pencari keadilan.
2. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan jajaran peradilan agama se-Wilayah PTA Padang sesuai dengan *core bussines* dari tugas fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
4. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dengan cara antara lain:
 - Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

LAMPIRAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/3923/OT.01.2/12/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

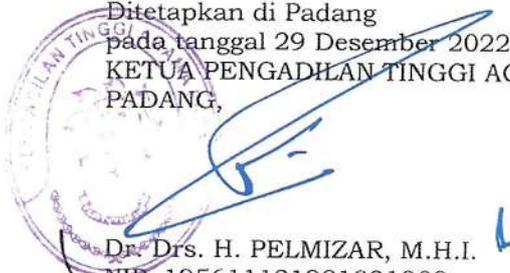
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022;**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sebagaimana pada lampiran II, dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,



Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.
NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/3923/OT.01.2/12/2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Penanggung jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Koordinator Validasi Data : Drs. Syafruddin
Ketua : H. Idris Latif, S.H., M.H.
Sekretaris : Ismail, S.H.I., M.A.
Anggota : 1. Mukhlis, S.H.
2. H. Damris, S.H.
3. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
4. Dra. Syuryati
5. Nora Oktavia, S.H.
6. Berki Rahmat, S.Kom.
7. Mursyidah, S.AP.
8. Winda Harza, S.H.
9. Fitriya Rafani, S.Kom.
10. Yova Nelindy, A.Md.
11. Novia Mayasari, S.E.
12. Efri Sukma
13. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.

Tim Pereviu Laporan Kinerja 1. H. Masdi, S.H.
2. Elvi Yunita, S.H., M.H.
3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
4. Rifka Hidayat, S.H.
5. H. M. Yazid, ZA., S.H., M.H.
6. Drs. Daryamurni
7. Drs. Syaiful Ashar, S.H.
8. Aidil Akbar, S.E.
9. Listya Rahma, S.H.
10. Riccellia Junifa, S.E.
11. Ade Armawi Paypas, S.Kom.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

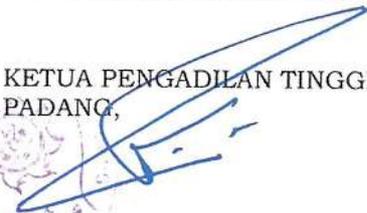
Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.
NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/3923/OT.01.2/12/2022
TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas pelaporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I. 
NIP. 195611121981031009



Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Hakim Tinggi

- Drs. H. Kharuddin, SH, MH.
- Drs. Bahrul Amzah, MH.
- Drs. Ridwan Alimudin, SH, MH.
- Drs. H. Amrullah, SH, MA.
- Drs. H. Syafril Amrol, MHI.
- Dra. Hj. Roslani, SH, MA.
- Drs. H. Saleh Ahmad, SH, MA.

Ketua
Dr. Drs. H. Rizmer, M.H.

Wakil Ketua
Dr. Drs. Yandani S, SH, MA.

Panitera Pengganti

- Rafesta, SAg
- Nana Oktavia, S.H.
- Drs. Daryansum
- Drs. H. Yuzardi
- Hj. Aifah, SH
- Drs. Syaiful Ashar, SH
- Drs. Hamzah
- Fazal Reza, SH
- Enjar Sodik, SH
- H. Khatung Sibarani, SAg
- Yun Ridwan, SH
- Malyani, SH
- H. M. Yazid, SH, MH.
- Dra. Syaryati
- Amrizal, SAg

Panitera
Drs. Syetuzah

Sekretaris
R. Idris Lusi, SH, MH.

Panitera Muda Banding
H. Dennis, SH

Panitera Muda Hukum
H. Nurd, SH

Kapala Bagian Perencanaan dan Pengembangan
Imrol, SH, MA

Kapala Bagian Umum dan Keuangan
MAMU, SH

- Supriyati, SAg, Sekretaris
- Maria Nani, SH, Sekretaris
- [Empty]
- [Empty]

- Restu Nurul, SAg, Sekretaris
- Alvian Nurul, SAg, Sekretaris
- [Empty]
- [Empty]

Kapala Subbagian Rencana Program dan Anggaran
Eli Yanti, SH, MHI

Kapala Subbagian Manajemen dan Teknologi Informasi
Rifka Hidayat, SH

Kapala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Rurasyah Handayani R, SH

Kapala Subbagian Kepegawaian dan Pelatihan
MAMU Sofes, SE, SH, MM

- Rizka Nurul, SAg, Sekretaris
- [Empty]
- [Empty]
- [Empty]

- Beni Nurul, SAg, Sekretaris
- Fahri Nurul, SAg, Sekretaris
- Nur Syarif, SAg, Sekretaris
- Abi Nurul, SAg, Sekretaris
- Muhammad Aid Farwidi, SAg, Sekretaris

- Beni Nurul, SAg, Sekretaris
- Rizka Nurul, SAg, Sekretaris
- Nur Syarif, SAg, Sekretaris
- Abi Nurul, SAg, Sekretaris
- Muhammad Aid Farwidi, SAg, Sekretaris

- Eli Nurul, SAg, Sekretaris
- Fahri Nurul, SAg, Sekretaris
- Nur Syarif, SAg, Sekretaris
- Abi Nurul, SAg, Sekretaris
- Muhammad Aid Farwidi, SAg, Sekretaris

PERNYATAAN TELAH DI REVIU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Keberhasilan dan keagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Padang, 27 Februari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang,



Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR: W3-A/1317.a/OT.01.1/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memenuhi kriteria SMART;
b. Telah dilakukannya asistensi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 oleh evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Straegis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu IKU tanggal 27 April 2022 tentang Pembahasan IKU PTA Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2022;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

- Laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2020-2024;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap subbagian dan kepaniteraan muda untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- KETIGA : Tujuan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :
1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 27 April 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PTA PADANG
 NOMOR : W3-A/1317.a/OT.01.1/IV/2022
 TANGGAL : APRIL 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 2) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 3) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. 4) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Pesentase perkara yang tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Catatan: 1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding 2) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 3) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.		
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Index Persepsi Kepuasan Stakeholder</i> Catatan: 1) PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2) Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 . 3) <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. 2) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : April 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Tinggi Agama Padang													
Sasaran Strategis							13,862.7	14,361.1	13,480.3	13.784.3	17,204.6	PTA Padang	
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.													
<i>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</i>			100%	-	-	-	-						
<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>			98%	100%	100%	100%	100%						
<i>Persentase penurunan sisa perkara</i>			100%	-	-	-	-						
<i>Persentase Perkara yang Tidak</i>			70%	75%	67%	67%	68%						

*Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi*

*Index persepsi
stakeholder yang puas
terhadap layanan
peradilan.*

90%	95%	98%	98%	98%
-----	-----	-----	-----	-----

*Persentase
penyelesaian perkara
ekonomi syariah*

100%	-	-	-	-
------	---	---	---	---

**Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara.**

*Persentase Salinan
putusan yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu*

100%	100%	100%	100%	100%
------	------	------	------	------

*Persentase Putusan
yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus*

100%	-	-	-	-
------	---	---	---	---

<i>Persentase layanan minutasi 1 hari (one day minutation)</i>	90%	-	-	-	-
<i>Persentase layanan publikasi putusan 1 hari (one day publish)</i>	90%	-	-	-	-
Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding					
<i>Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan</i>	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Nilai indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>	80	83	85	88	90
<i>Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen</i>	94	92	93	94	95

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

222.0 310.5 388.5 388.5 388.5 PTA Padang

**Peningkatan
Manajemen Peradilan
Agama***Akreditasi Lembaga*14 19 19 19 19
satker satker satker satker satker*Peningkatan kapasitas
aparatur negara*36 36 72 72 72
orang orang orang orang orang*Pemantauan dan
evaluasi serta
pelaporan*14 18 18 18 18
laporan laporan laporan laporan laporan**Program Dukungan Manajemen**

13,640.0 13,520.6 13,091.8 13,395.8 16,816.1 PTA Padang

**Meningkatnya
kualitas layanan
dukungan manajemen
untuk mendukung
pelaksanaan
pelayanan prima
Pengadilan Tinggi
Agama Padang***Jumlah pengelolaan
pelayanan sistem
informasi terintegrasi*1 1 1 1 1
layanan layanan layanan layanan layanan

<i>Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif</i>	43 orang	44 orang	49 orang	51 orang	53 orang
<i>Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di PTA Padang dan 4 lingkungan peradilan di Sumatera Barat</i>	456 laporan	456 laporan	456 laporan	456 laporan	456 laporan
<i>Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien</i>	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
<i>Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan</i>	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
<i>Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan</i>	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

<i>Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan SDM PTA Padang</i>	4 layanan				
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kegiatan 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

222.0 205.3 369.5 469.5 569.5 **PTA Padang**

Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di PTA Padang

<i>Akreditasi Lembaga</i>	14 satker	19 satker	19 satker	19 satker	19 satker
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<i>Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama</i>	36 orang	36 orang	72 orang	72 orang	72 orang
--	----------	----------	----------	----------	----------

<i>Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan</i>	3 laporan	28 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan
--	-----------	------------	------------	------------	------------

**Kegiatan 2 : Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi**

13,520.6 13,914.4 13,789.2 14,789.2 16,065.5 **PTA Padang**

**Pengelolaan Keuangan
yang transparan dan
akuntabel**

Perolehan Opini WTP

WTP WTP WTP WTP WTP

*Persentase penyelesaian kerugian
negara yang dikembalikan*

100% 100% 100% 100% 100%

*Persentase realisasi
Penerimaan Negara
Bukan Pajak*

100% 100% 100% 100% 100%

*Persentase realisasi
anggaran belanja
Mahkamah Agung*

100% 100% 100% 100% 100%

**Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan
Prasarana di PTA Padang**

181.0 37.5 1,276.3 1,276.3 1,000.0 **PTA Padang**

**Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana**

<i>Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Tusi</i>	100%	100%	100%	100%	100%
--	------	------	------	------	------



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**



**REVISI RENCANA KINERJA
TAHUNAN
2022**



@ptapadangoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
NO. W3-A/1424/OT.01.1/5/2022
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	67%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	98
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%



Padang, 18 Mei 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang,

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

NIP. 195508261982031004

CATATAN REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 tertanggal 7 Desember 2020
Revisi Ke-1 Rencana Kinerja Tahun 2022 pada tanggal 7 Desember 2021
Revisi Ke-2 Rencana Kinerja Tahun 2022 pada tanggal 18 Mei 2022

Telah dilakukan revisi terhadap Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alasan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian persentase target dengan target dalam Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 yaitu:

No	Revisi Ke-1 RKT 2022	Revisi Ke-2 RKT 2022
1	Indikator "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK" target sebesar 70%	- Dilakukan perbaikan redaksi sesuai dengan IKU Tingkat Banding dari Mahkamah Agung menjadi "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi". - Melakukan revisi capaian target menjadi 67%.
2	Indikator "Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan" target sebesar 99%	Melakukan revisi capaian target menjadi 98%



Padang, 18 Mei 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
NIP. 195508261982031004



**Pengadilan Tinggi Agama
Padang**

REVISI **Rencana Kinerja** **Tahunan** **2022**

**"Terwujudnya
Pengadilan Tinggi Agama
Padang
yang Agung"**



REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
NO.W3-A /3193.a /OT.01.1/I/2021
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	70 %
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang	99 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %

Padang, 7 Desember 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang


Drs. H. Zein Ahsan, MH
NIP. 195508261982031004

Catatan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 tertanggal 7 Desember 2020

Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 tertanggal 7 Desember 2021

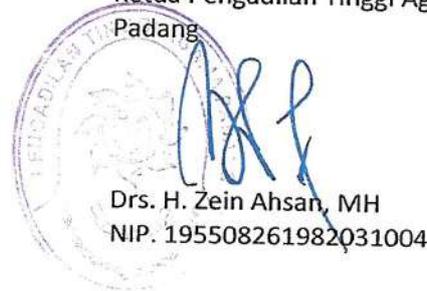
Telah dilakukan Revisi terhadap Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alasan sebagai berikut :

1. Melakukan Penyesuaian Persentase Target dengan Target dalam Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020-2024 yaitu :

No	RKT 2022	Reviu RKT 2022
1	Indikator "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK" sebelumnya target yang ditetapkan adalah sebesar 75%	Melakukan revisi capaian target menjadi 70%
2	Indikator "Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan" sebelumnya target yang ditetapkan adalah sebesar 95%	<ul style="list-style-type: none">- Diperbaiki redaksinya sesuai dengan Reviu IKU dan Reviu Renstra PTA Padang menjadi "Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang"- Melakukan revisi capaian target menjadi 99%

2. Perubahan format RKT sesuai dengan Format dari Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung

Padang, 7 Desember 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang



Drs. H. Zein Ahsan, MH
NIP. 195508261982031004



**Pengadilan Tinggi Agama
Padang**

PERJANJIAN KINERJA 2022

**"Terwujudnya
Pengadilan Tinggi Agama
Padang
yang Agung"**



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, M.H**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H, M.H
NIP. 196303131989031021

Padang, 19 Mei 2022
Pihak Pertama

Drs. H. Zein Ahsan, M.H
NIP. 195508261982031004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	67%
		Index persepsi stackholder yang puas terhadap layanan Peradilan	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan

- | | Anggaran |
|---|----------------------|
| 1. Pembinaan Aministrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 14.432.055.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 316.000.000,- |
| 3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama | Rp. 388.802.000,- |



Direktur Jenderal Badan Peradilan

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H, M.H
NIP. 196303131989031021



Padang, Mei 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Drs. H. Zein Ahsan, M.H
NIP. 195508261982031004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, M.H**

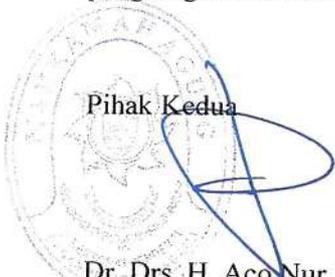
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

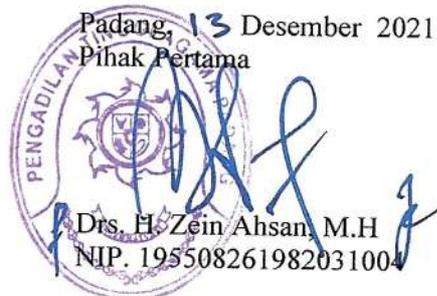
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Pihak Kedua

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H, M.H
NIP. 196303131989031021



Padang, 13 Desember 2021
Pihak Pertama

Drs. H. Zein Ahsan, M.H
NIP. 195508261982031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK)	70%
		Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan PTA. Padang	99 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 14.432.055.000,-
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Rp. 316.000.000,-
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama Rp. 388.802.000,-

Direktur Jenderal Badan Peradilan

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H, M.H
NIP. 196303131989031021

Padang, 13 Desember 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Drs. H. Zein Ansan, M.H
NIP. 195508261982031004



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25179

Nomor : W3-A/**0310**/OT.01.1/1/2023
Lamp : 1 Lampiran
Perihal : Undangan

Padang, 11 Januari 2023

Yth.

Tim Penyusun LKjIP Tahun 2022 (daftar nama terlampir)

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Bersama ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti Rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 12 Januari 2023

Jam : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : *Command Center* Pengadilan Tinggi Agama Padang

Agenda : Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2022

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua Tim Penyusun LKjIP



Drs. H. Idris Latif, S.H, M.H
NIP. 196404101993031002

LAMPIRAN
NOMOR: W3-A/0210/OT.01.1/1/2023
TANGGAL : 11 JANUARI 2023

Yth:

1. Ismail, S.H.I., M.A.
2. Mukhlis, S.H.
3. H. Damris, S.H.
4. Nurasyiah Handayani Rangkuti, S.H.
5. Dra. Syuryati
6. Nora Oktavia, S.H
7. Berki Rahmat, S.Kom.
8. Mursyidah, S.AP.
9. Winda Harza, S.H.
10. Fitrya Rafani, S.Kom.
11. Yova Nelindy, A.Md.
12. Novia Mayasari, S.E.
13. Efri Sukma
14. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md. A.B.
15. H. Masdi, S.H.
16. Elvi Yunita, S.H., M.H.
17. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
18. Rifka Hidayat, S.H.
19. H. M. Yazid, ZA., S.H., M.H.
20. Drs. Daryamurni
21. Drs. Syaiful Ashar, S.H.
22. Aidil Akbar, S.E.
23. Listya Rahma, S.H.
24. Riccelia Junifa, S.E.
25. Ade Armawi Paypas, S.Kom.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass km 24 Anak Air, Kel. Batipuh Panjang, Padang 25179

Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : Rapat
Agenda : Rapat Penyusunan LKjIP
Hari/Tanggal : Kamis /12 Januari 2023
Pukul : 08.30
Tempat : Command Centre PTA Padang

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Nurhafizal	HT	
2.	lennan	Kecubing	
3.	Nurasyah	Kecubing TU & RT	
4.	Mukhlis	Ketay Umum	
5.	ELVI Yunita	Kecubing Rencana Program Anggota	
6.	Nadia Mayarani	staf	
7.	Vepurugi	PP	
8.	syariful Ashar	PP	
9.	DARTANURNI	PP	
10.	Winda Harzen	Analisis Perkara Peradilan	
11.	Recha M.R	Anggota	
12.	RICEHA JUNRA	CPNS APEP	
13.	FASIA	PP	
14.			
15.			



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass km 24 Anak Air, Kel. Batipuh Panjang, Padang 25179

Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

NOTULEN RAPAT

Nama Kegiatan : Rapat Tim Penyusun LKJIP PTA Padang Tahun 2022
Hari/Tanggal/Pukul : Kamis/ 12 Januari 2023/ 08.30 WIB
Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Agama Padang
Pimpinan Rapat : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang
Peserta Rapat : Tim Penyusun LKJIP PTA Padang

CATATAN RAPAT

Panitera :

- ✓ Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PTA Tahun 2021 adalah 78,95 atau BB. Agar dapat meningkatkan nilai SAKIP PTA Tahun 2022 dengan nilai A.
- ✓ Rancangan LKJIP Tahun 2022 sudah selesai diserahkan ke bagian renprog PTA Padang Minggu pertama bulan Februari.
- ✓ Dilakukan reviu LKJIP 2022 pada Minggu Ketiga Bulan Februari sebelum Dokumen SAKIP dikirimkan.

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian:

- ✓ Pembagian tugas disesuaikan dengan SK KPTA Nomor W3-A/3923/OT.01.2/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022
- ✓ Setiap Koordinator bertanggung jawab terhadap Draf BAB yang menjadi tanggung jawabnya.
- ✓ Draf masing masing BAB telah di setor ke Bagian Renprog paling lambat Minggu Pertama tanggal 4 Februari 2022 untuk dilakukan kompilasi dan pemutakhiran.

Pertanyaan

Nurhafizal (Hakim Tinggi) :

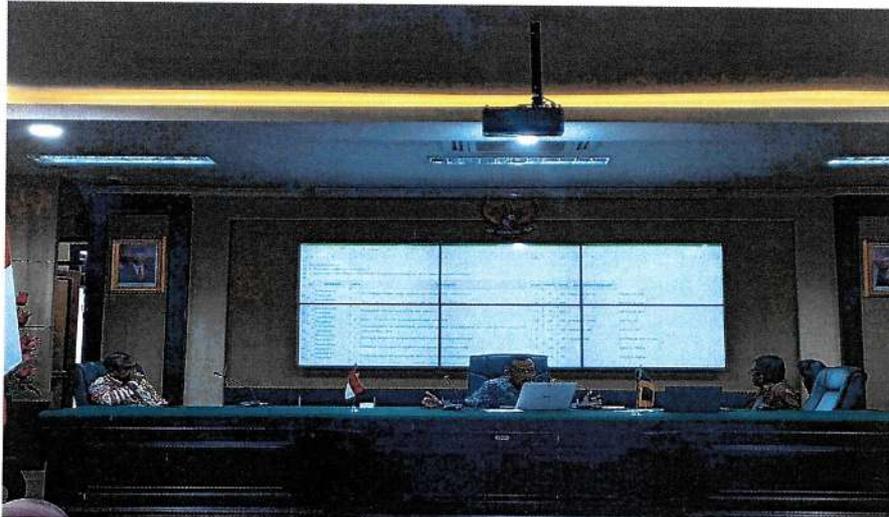
1. Jika target yang di perjanjikan dalam PK tidak tercapai, seperti pada Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) dimana ternyata banyak yang mengajukan upaya hukum, bagaimana di laporannya? Apakah nilai akan rendah?

2. Melihat desain LKjIP masih banyak dalam bentuk narasi, bagaimana jika dilakukan perbaikan desain sehingga LKjIP jadi lebih menarik.

Jawaban:

1. Rencana yang ditargetkan telah di tetapkan berdasarkan capaian dalam 3 Tahun terakhir. Tidak mengapa dibawah atau diatas target, namun tidak kurang/melewati 10% dari target (batas wajar) dan harus dapat dijelaskan dalam LKjIP, ada analisisnya, mengapa terjadi, apa penyebabnya, apa saja antisipasi/usaha yang telah dilakukan, bagaimana solusi kedepan.
2. Sesuai dengan hasil pendampingan dan evaluasi Bawas, membuat LKjIP dengan gambar, diagram dan bentuk yang lebih menarik diperbolehkan, namun tetap tidak menghilangkan substansi laporannya yakni dapat menggambarkan kinerja PTA Padang. Akan dicoba dilakukan untuk LKjIP 2022.

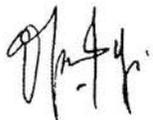
Dokumentasi Rapat



PEMBAHASAN :

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tanggal Penyelesaian (Status)
1.	Penyerahan Draf LKJIP per BAB	Draf BAB dalam LKJIP diserahkan ke bagian renprog oleh setiap Koordianator BAB	Minggu Pertama Bulan Februari 2022	Koordinator Tim	
2.	Reviu SAKIP yang telah dilakukan sebelum dikirim	Melakukan Reviu SAKIP yang telah dibuat sebelum dikirim	Minggu Ketiga Bulan Februari	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian /Kasubbag Rencana Program Anggaran	

Dibuat Oleh,



Elvi Yunita, SH, MH

Padang, 12 Januari 2023

Diketahui Oleh,



Drs. Syafruddin.
Pimpinan Rapat

Penghargaan Tahun 2022

1. Pada tanggal 1 April 2022, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima penghargaan Sebagai Peringkat Pertama untuk Laporan Keuangan -UAPPA-W Terbaik Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat dengan Nilai 95.50 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.



2. Pada 18 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima Piagam penghargaan dari KPPN Padang sebagai Terbaik Keempat Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Konversi Bobot 100% Periode Semester 1 Tahun 2022.



3. Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima penghargaan sebagai satuan kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran kategori Satker Non Kementerian Keuangan (Konversi 100%) Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan nilai 99,17.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Jl. By Pass KM. 24
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171
(0751) 7054806
admin@pta-padang.go.id

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022
Pengadilan Tinggi Agama Padang



@ptapadangoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id